

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Literasi Digital

Edisi 51
Februari 2023



TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
JH Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Wajah Literasi Digital Indonesia

Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kecakapan digital bangsa Indonesia terus dijalankan. Di tengah era disrupsi teknologi saat ini, literasi digital menjadi salah satu pilar pendukung bagi masyarakat Indonesia menghadapi agenda transformasi digital yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hasil survei Status Literasi Digital di Indonesia tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi digital pada masyarakat Indonesia sebesar 0,05 poin menjadi 3,54 dibandingkan tahun sebelumnya.

Survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Katadata Insight Center ini diukur menggunakan Kerangka Indeks Literasi Digital tahun 2022 dengan pendekatan empat pilar, yaitu Kecakapan Digital (Digital Skill), Etika Digital (Digital Ethics), Keamanan Digital (Digital Safety), dan Budaya Digital (Digital Culture).

Beragam indikator menjadi tolak ukur dari keempat pilar tersebut, mulai dari kemampuan masyarakat untuk mencari dan mengakses data, informasi dan konten di media digital; membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemampuan menahan diri untuk tidak berkomentar kasar atau negatif, hingga kemampuan menyesuaikan cara berkomunikasi dan mempertimbangkan keragaman budaya pengguna media sosial saat membagikan suatu pesan atau informasi.



Rhina Anita

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

Termasuk indikator dari sisi keamanan, seperti terbiasa membuat kata sandi yang aman dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca, hingga kemampuan membedakan email yang berisi spam, virus, maupun malware.

Secara hasil keseluruhan survei, terdapat tiga pilar yang meningkat, yaitu Pilar 1 (Digital Skill) naik sebesar 0,08 poin menjadi 3,52, lalu Pilar 2 (Digital Ethics) naik sebesar 0,15 poin menjadi 3,68, serta Pilar 3 (Digital Safety) naik 0,02 poin menjadi 3,12. Sementara Pilar 4 (Digital Culture), meski tetap menduduki pilar dengan peringkat tertinggi, mengalami sedikit penurunan sebesar 0,06 poin dari tahun lalu menjadi 3,84.

Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi dan menyusun informasi yang jelas melalui tulisan dan media lain di berbagai platform digital atau jejaring internet.

Selain secara rutin melakukan pengukuran literasi digital masyarakat, upaya peningkatan literasi digital juga dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan menyusun Road Map Literasi Digital 2021 - 2024. Di dalam peta jalan tersebut ada kerangka kerja yang dipakai untuk merancang program dan kurikulum Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) 2021 – 2024.

Tak hanya itu, pada 2021 lalu pemerintah juga meluncurkan empat modul literasi digital, yaitu Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital dan modul Cakap Bermedia Digital. Modul ini merupakan manifestasi kolaborasi dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, Jaringan Penggiat Literasi Digital (Japelidi) dan Kementerian Kominfo.

Berbagai upaya pemerintah meningkatkan literasi digital masyarakat tersebut akan dikupas secara mendalam pada KominfoNext edisi kali ini. Juga dikupas seputar agenda peringatan Hari Pers Nasional serta pelaksanaan event internasional F1 Powerboat Toba.

Selamat membaca!

**Literasi digital
menjadi salah satu
pilar pendukung
bagi masyarakat
Indonesia
menghadapi
agenda
transformasi
digital**

Tinjau Pembangunan Istana Presiden di IKN, Presiden: 2024 Upacara di Sini

Dalam keterangannya di depan awak media, Presiden optimis kawasan Istana Kepresidenan akan siap digunakan untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI pada bulan Agustus 2024 mendatang.



Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi Istana Kepresidenan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Kamis, 23 Februari 2023. Dalam keterangannya di depan awak media, Presiden optimis kawasan Istana Kepresidenan akan siap digunakan untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI pada bulan Agustus 2024 mendatang.

“Kawasan ini adalah kawasan istana, Istana Kepresidenan yang saya optimistis tahun depan bulan Agustus insyaallah sudah bisa upacara di sini,” ujar Presiden.

“Kalau melihat landscape dan yang lain-lainnya, tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya, pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimistis insyaallah selesai,” lanjut Presiden.

Presiden menyebut bahwa desain dari Istana Presiden akan sama seperti yang dirancang oleh seniman I Nyoman Nuarta. Meski demikian, akan tetap ada penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

“Desain-nya sama, tapi juga nanti di lapangan ya mungkin sedikit-sedikit ada penyesuaian dengan kondisi lapangannya,” ungkap Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa Istana Presiden di IKN memiliki keistimewaan dibanding dengan istana lainnya yang sudah ada di Indonesia. Menurut Presiden, Istana Presiden di IKN adalah hasil karya anak bangsa.

“Dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Bedanya itu, oleh putra-putri bangsa terbaik Indonesia,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa semua bangunan yang ada di IKN akan langsung ditempati segera setelah selesai dibangun. Hal itu dilakukan agar keramaian di IKN segera terwujud.

“Kalau ada keramaian berarti perlu restoran, perlu sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, Universitas, perlu rumah sakit, perlu klinik, perlu *entertainment*, hiburan, perlu mal, dll,” tutur Presiden.



Presiden pun meyakini IKN akan memberikan daya tarik bagi para investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Presiden menilai IKN memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

“Kita ini menawarkan suasana. Ini kawasan inti adalah kawasan pemerintahan. Tapi di luar itu adalah orang akan melihat suasana yang berbeda, ada diferensiasinya, itu yang kita jual. *Experience, ambience*, semua yang kita jual itu,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Badan Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/tinjau-pembangunan-istana-presiden-di-ikn-presiden-2024-upacara-di-sini/>



Wapres Dorong Pembangunan Pusat Pendidikan di Titik Nol Peradaban Islam

Tapanuli Tengah, wapresri.go.id - Sebagai titik nol peradaban Islam nusantara, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan alamnya. Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun monumen atau pusat pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat.

"Saya minta terus dievaluasi ya. kemarin itu sudah bagus di kesehatan, itu sudah lebih bagus ya untuk penanganannya di Arafah, Mina itu," tegas Wapres dalam keterangan persnya di Masjid Agung Cianjur, Jalan Siti Jenab No. 21 Pamoyanan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (19/02/2023).

Menurut Wapres, pelayanan haji yang mencakup kesehatan, pembimbingan haji, konsumsi, serta akomodasi harus ditingkatkan kualitas pelayanannya.

"Saya kira harus optimal ya, pelayanan ini kan menyangkut masalah kesehatan, menyangkut masalah bimbingan haji, menyangkut masalah pemondokan, masalah tempat yang jangan terlalu jauh, kemudian juga kateringnya," imbau Wapres.

"Ini memang [perlu optimalisasi pelayanan] karena itu ongkos haji ada kaitannya dengan biaya-biaya ini, pelayanan itu," tambahnya.

Sementara itu, kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pengurus administrasi dan keuangan persiapan para calon jemaah haji, Wapres berharap dana yang dikelola dapat dikembangkan secara optimal untuk berinvestasi. Sehingga, keuntungannya diharapkan dapat mendukung subsidi biaya haji.

"Pertama tentu saja soal investasi itu kalau dalam UU itu investasi itu harus menguntungkan, aman. Itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH," pesan Wapres.

Lebih jauh, Wapres menekankan, BPKH perlu memiliki ahli-ahli investasi yang dapat mengelola keuangan menjadi usaha yang memberikan manfaat bagi penyelenggaraan haji, seperti travel, perumahan, katering, dan sebagainya.

"Memang perlu ada juga di situ ahli-ahli investasi yang bisa artinya memantau usaha-usaha apa, baik di Indonesia sendiri, maupun di Arab Saudi," pungkasnya.

Turut mendampingi Wapres pada keterangan per ini Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Ketua MUI Cholil Nafis. (DAS/SK-BPMI, Setwapres)

<https://www.wapresri.go.id/wapres-dorong-pembangunan-pusat-pendidikan-di-titik-nol-peradaban-islam-nusantara/>



Presiden Paparkan Sejumlah Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Presiden juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Tanah Air. Presiden menyebut investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional.



Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya adalah dengan melakukan hilirisasi di daerah. Menurut Presiden, setiap daerah memiliki potensi untuk melakukan hilirisasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, yang digelar di Ballroom Hotel Novotel, Kota Balikpapan, pada Kamis, 23 Februari 2023.

“Jangan hanya berfikir hilirisasi ada di nikel, di tembaga. Di perikanan, pertanian, perkebunan memiliki potensi yang besar juga dan semua daerah memiliki ini semuanya,” ujar Presiden.

Presiden memberikan contoh hilirisasi yang dilakukan oleh Thailand, yaitu dengan mempercantik kemasan kelapa muda biasa menjadi ‘Coco Thumb’ sehingga memiliki nilai tambah hingga tiga kali lipat. Presiden yakin, masyarakat Indonesia juga bisa melakukan hal serupa jika diberi dorongan dan dukungan.

“Kita bukan bisa, sangat bisa melakukan itu. Daerah sangat bisa melakukan itu dan rakyat bisa melakukan itu. Dorong untuk ke sana,” ungkap Presiden.

Contoh lainnya adalah hilirisasi di bidang perikanan. Menurut Presiden, nilai tambah ikan akan meningkat jika diubah menjadi berbagai macam produk olahan ikan maupun tepung ikan.

“Nelayan, UMKM, koperasi, industri kecil didorong untuk melakukan itu dan produk-produk yang lainnya yang sangat banyak ragamnya di daerah-daerah,” ucap Presiden.

Selain hilirisasi, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Tanah Air. Presiden menyebut investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kunci pertumbuhan ekonomi semua negara sekarang ini yang paling penting hanya 1, bagaimana investasi itu masuk? Dan semua negara memperebutkan yang namanya investasi,” ungkap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta para gubernur untuk mempermudah perizinan sehingga para investor yang akan berinvestasi di wilayahnya tidak mengalami kendala maupun hambatan. “Tolong dicek kembali, cek kembali mengenai kemudahan perizinan, cek kembali,” tutur Presiden.

Presiden juga meminta para gubernur untuk segera mengubah proses perizinan investasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Presiden menilai dengan digitalisasi maka perizinan investasi akan makin mudah dan cepat.

“Jangan berbulan-bulan, paling lambat itu ya hari, kalau bisa jam. Bagaimana digitalisasi di perizinan semua provinsi kabupaten dan kota itu ada,” tandasnya.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-paparkan-sejumlah-upaya-peningkatan-pertumbuhan-ekonomi-nasional/>



Konsistensi Hilirisasi, Kunci Menuju **Indonesia Maju**

Presiden menyatakan bahwa ia telah memerintahkan jajarannya untuk fokus melakukan hilirisasi.



Presiden Joko Widodo menghadiri Mandiri Investment Forum (MIF) 2023, yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Rabu, 1 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konsistensi hilirisasi merupakan kunci Indonesia untuk melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2023, di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Rabu, 1 Februari 2023.

“Saya hanya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu menjadi kunci, konsistensi kita di dalam industrialisasi, hilirisasi menjadi kunci,” ucap Presiden.

Presiden menyatakan bahwa ia telah memerintahkan jajarannya untuk fokus melakukan hilirisasi. Presiden tidak ingin jajarannya takut untuk melakukan kebijakan hilirisasi karena adanya gugatan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Saya sampaikan kepada para menteri tiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO, terus. Kalah, tetap terus karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita,” ujar Presiden.

Presiden juga meminta jajarannya untuk tidak berpuas diri terhadap keberhasilan hilirisasi nikel. Presiden menyebut bahwa pemerintah akan melanjutkan hilirisasi pertambangan ke komoditas lainnya, seperti bauksit dan juga tembaga.

“Saya sudah sampaikan di Desember kemarin, bauksit stop bulan Juni. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi, tembaga stop tahun ini, stop,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi sangat besar. Berdasarkan data yang diterima, proyeksi dampak hilirisasi minerba dan gas akan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja hingga 8,8 juta.

“Sebuah dampak yang sangat besar sekali. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ini nikel sudah, stop,” ucap Presiden.



Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menitikpkan pesan kepada para pelaku perbankan untuk ikut serta mengawasi dan mendukung kebijakan hilirisasi di Tanah Air. Salah satunya adalah dengan membentengi pasar modal bagi badan usaha maupun perusahaan yang akan membuat smelter.

“Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Jelas, untungnya jelas, untuk negara jelas, untuk perusahaan juga jelas, apa yang harus kita tanyakan lagi,” tutur Presiden.

Presiden pun berharap melalui konsistensi hilirisasi, Indonesia akan menjadi negara maju dengan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia pada tahun 2045 mendatang bisa mencapai angka 9 hingga 11 triliun USD. Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia juga bisa mencapai 21.000 USD hingga 29.000 USD.

“Jadi negara maju kita. Tapi kalau nanti digugat kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju,” tandasnya.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-tegas-kan-konsistensi-hilirisasi-adalah-kunci-menuju-indonesia-maju/>



Kabar Istisna

Wapres Minta Evaluasi Peningkatan Layanan Haji

Cianjur, wapresri.go.id – Seiring dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, pemerintah terus mempersiapkan berbagai kebutuhan haji. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pun meminta pihak-pihak terkait terus melakukan evaluasi, sehingga pelayanan bagi jamaah haji Indonesia dapat optimal.

"Saya minta terus dievaluasi ya. kemarin itu sudah bagus di kesehatan, itu sudah lebih bagus ya untuk penanganannya di Arafah, Mina itu," tegas Wapres dalam keterangan persnya di Masjid Agung Cianjur,

Jalan Siti Jenab No. 21 Pamoyanan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (19/02/2023).

Menurut Wapres, pelayanan haji yang mencakup kesehatan, pembimbingan haji, konsumsi, serta akomodasi harus ditingkatkan kualitas pelayanannya.

"Saya kira harus optimal ya, pelayanan ini kan menyangkut masalah kesehatan, menyangkut masalah bimbingan haji, menyangkut masalah pemondokan, masalah tempat yang jangan terlalu



jauh, kemudian juga kateringnya,” imbau Wapres.

“Ini memang [perlu optimalisasi pelayanan] karena itu ongkos haji ada kaitannya dengan biaya-biaya ini, pelayanan itu,” tambahnya.

Sementara itu, kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pengurus administrasi dan keuangan persiapan para calon jemaah haji, Wapres berharap dana yang dikelola dapat dikembangkan secara optimal untuk berinvestasi. Sehingga, keuntungannya diharapkan dapat mendukung subsidi biaya haji.

“Pertama tentu saja soal investasi itu kalau dalam UU itu investasi itu harus menguntungkan, aman. Itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH,” pesan Wapres.

Lebih jauh, Wapres menekankan, BPKH perlu memiliki ahli-ahli investasi yang dapat mengelola keuangan menjadi usaha yang memberikan manfaat bagi penyelenggaraan haji, seperti travel, perumahan, katering, dan sebagainya.

“Memang perlu ada juga di situ ahli-ahli investasi yang bisa artinya memantau usaha-usaha apa, baik di Indonesia sendiri, maupun di Arab Saudi,” pungkasnya.

Turut mendampingi Wapres pada keterangan per ini Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Ketua MUI Cholil Nafis. (DAS/SK-BPMI, Setwapres)

<https://www.wapresri.go.id/wapres-minta-evaluasi-peningkatan-layanan-haji/>



Pimpin Rakor Penurunan Stunting, Wapres: Berdayakan Masyarakat Hingga ke Tingkat Desa

Mamuju, wapresri.go.id - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin memimpin langsung Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat, Kamis (23/2/2023).

Pada rapat yang diikuti oleh Pj. Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan para Bupati se-Sulawesi barat tersebut, Wapres mendengarkan secara langsung laporan dari Pejabat Gubernur, para Bupati atau yang mewakili, tentang kemajuan program yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, dan rencana ke depan untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Barat.

Wapres menyebutkan, bahwa Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Meskipun dalam 4 tahun terakhir prevalensi stunting di Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan, namun Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi, yaitu mencapai 35 persen.

"Dalam 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022, secara umum angka stunting di Sulawesi Barat memang telah turun 6,6 persen. Namun, Sulawesi Barat masih termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Sulawesi Barat masih sebesar 35 persen. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 1,2 persen dari tahun 2021," papar Wapres saat membuka rapat.

Lebih jauh Wapres juga menyampaikan, bahwa dari sisi ketahanan pangan yang diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Sulawesi Barat dikategorikan Sangat Tahan. Dengan demikian, Wapres menilai, seharusnya tidak ada masalah

dengan ketersediaan bahan pangan. Tinggal bagaimana sumber pangan yang berlimpah tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi asupan gizi ibu hamil dan anak balita.

Setelah mendengarkan laporan dari Pj. Gubernur dan para Bupati, Wapres pun memberikan apresiasi atas komitmen, kinerja, dan upaya menurunkan stunting yang telah dilakukan. Namun demikian, Wapres juga melihat terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, dan beberapa cakupan intervensi yang dinilai masih belum baik.

Oleh karena itu, Wapres memberikan beberapa arahan pokok untuk ditindaklanjuti agar penurunan stunting di Sulawesi Barat dapat dipercepat.

Pertama, Wapres meminta agar upaya percepatan penurunan dilanjutkan. Wapres mengingatkan bahwa penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kemanusiaan.

Kedua, Wapres meminta agar koordinasi diperbaiki. Semua pihak harus menghilangkan ego sektoral.

"Perbaiki koordinasi antarpihak, baik dalam lingkup pemerintah daerah, TNI/Polri, maupun dengan lembaga non-pemerintah seperti universitas, dunia usaha, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, karena penurunan stunting merupakan tugas bersama," tegas Wapres.

Ketiga, Wapres meminta agar dipetakan kantong-kantong wilayah stunting, dan diidentifikasi layanan yang masih kurang dan harus diperbaiki, diikuti dengan penyusunan program untuk mengintervensi masalah yang ada dengan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat.

Keempat, Wapres juga meminta agar semua pelaku di tingkat desa diberdayakan dan dikoordinasikan, baik Kader Posyandu, Kader PKK, Kader Penyuluh KB, Kader Sanitasi, Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, dan lainnya.

Kelima, Wapres meminta para tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.

Selanjutnya, Wapres meminta agar dikembangkan program untuk meningkatkan konsumsi protein hewani oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti ikan dan telur.

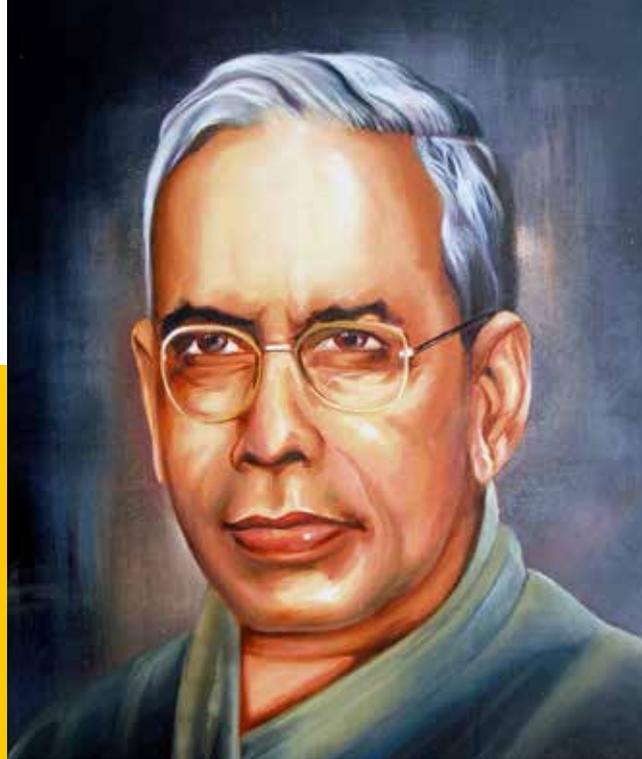
"Hal ini bukan masalah bagi Sulawesi Barat sebagai salah satu sentra penghasil ikan. Selain ikan, juga ada telur. Dengan harga yang murah, kandungan gizi yang baik, mudah diperoleh dan diolah, konsumsi telur satu butir per hari adalah pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan protein hewani," imbuh Wapres.

Terakhir, Wapres menekankan agar dilakukan perbaikan proses pengumpulan data dan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung percepatan penurunan stunting agar pelaksanaan program dapat terpantau dengan baik.

Esok harinya, Jumat (24/02/2023), Wapres akan melanjutkan kunjungan lapangan ke salah satu Posyandu untuk melihat secara langsung pelaksanaan program penurunan prevalensi stunting yang dilakukan.

Sebagai informasi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dan kurangnya stimulasi yang diukur dari tinggi badan anak dibandingkan dengan umurnya. Stunting mempunyai dampak yang besar baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan percepatan penurunan stunting sejak tahun 2017. Prevalensi stunting nasional tahun 2022 adalah sebesar 21.6 persen. mengalami penurunan sebesar 2.8 persen poin dari prevalensi tahun 2021.

<https://www.wapresri.go.id/pimpin-langsung-rapat-koordinasi-penurunan-stunting-wapres-minta-berdayakan-masyarakat-hingga-ke-tingkat-desa/>



Ranganathan dan Perpustakaan

Siapa yang kenal sama Shiyali Ramamrita Ranganathan?

Yakin deh, yang ke perpustakaan juga nggak tau kan siapa S. R. Ranganathan. Ranganathan, seorang pustakawan dan ahli matematika India kelahiran tahun 1892 ini secara luas dikenal karena karya-karyanya di bidang Ilmu Perpustakaan, Dokumentasi, dan Ilmu Informasi. Bahkan tanggal lahirnya, 12 Agustus, dirayakan sebagai hari Perpustakaan Nasional di India.

Memangnya apa aja sih peninggalannya bagi dunia perpustakaan, sampai hari lahirnya dijadikan hari besar bagi masyarakat India? **Yang pertama** adalah klasifikasi kolon atau Colon Classification. Selain Dewey Decimal Classification (DDC), Library of Congress Classification (LCC) dan Universal Decimal Classification (UDC), ada yang Colon Classification yang dirumuskan oleh Ranganathan. Colon Classification ini sampai sekarang masih dipakai oleh perpustakaan perpustakaan di India.



Yang kedua, yang banyak dijadikan sebagai landasan filosofi banyak perpustakaan di dunia, adalah lima hukum ilmu perpustakaan, yang terdiri dari:

1. Books are for use (buku untuk dimanfaatkan)
2. Every reader his book (setiap pembaca terdapat bukunya)
3. Every book its reader (setiap buku terdapat pembacanya)
4. Save the time of the reader (hemat waktu pembaca)
5. A library is a growing organism (perpustakaan bagai organisme yang sedang tumbuh)



Hukum ilmu perpustakaan yang pertama bisa diartikan bahwa buku yang ada di perpustakaan adalah untuk digunakan. Konon Ranganathan memperhatikan bahwa ada koleksi perpustakaan yang cuma disimpan aja, bahkan sampai di rantai karena takut rusak.

Untuk hukum yang kedua, Ranganathan menjelaskan bahwa pustakawan harus melayani banyak koleksi pemustaka, mengumpulkan literatur agar sesuai dengan berbagai macam kebutuhan. Dan yang paling penting, pustakawan harus menghormati bahwa setiap pemustaka berbeda dan bahwa setiap pemustaka memiliki selera yang berbeda mengenai buku yang mereka pilih.

Di hukum yang ketiga, Ranganathan menitikberatkan bahwa setiap buku punya pembaca, walaupun misalnya hanya sebagian kecil dari jumlah pengguna perpustakaan.

Nah, hukum keempat ini yang membuat kenapa perpustakaan perlu nomor panggil dan katalog untuk pemustakanya, agar menghemat waktu si pembaca. Pustakawan harus dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menemukan kembali buku yang ada di perpustakaan.

Terakhir, hukum kelimanya adalah perpustakaan adalah organisasi yang terus berkembang. Ranganathan menyebutkan ada dua jenis perkembangan nih. Berkembang dengan bertambah kuantitas koleksinya, atau berkembang dengan meningkatkan kualitas koleksinya dengan mengganti koleksi yang lama ke koleksi yang baru atau lebih update.

Nah, berangkat dari sini perpustakaan kementerian kominfo melakukan renovasi agar pelayanan perpustakaan jadi lebih baik. Dengan konsep rak buku yang baru, pengunjung perpustakaan bisa langsung mencari di rak dengan nyaman.

Untuk keperluan temu kembali, kami juga sudah menyiapkan katalog di perpustakaan. kominfo.go.id yang dapat diakses melalui jaringan internal kominfo. Di katalog ini juga tersedia keterangan koleksi, apakah tersedia atau sedang dipinjam. Nah kalau koleksi tersedia bisa langsung mengunjungi perpustakaan untuk melakukan peminjaman.

Dengan terus menambah koleksi, memperbarui koleksi dan digitalisasi, perpustakaan Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha melayani pemustaka sepenuh hati.



Tak Semua Informasi Maya Positif Kominfo Petakan Wilayah Berkebutuhan Literasi Digital

Jika dibandingkan 2021, hasil survei Indeks Literasi Digital Kominfo 2022 terdapat peningkatan sekitar nol koma nol lima poin. Dari sebelumnya 3,49 sekarang sudah mencapai 3,54 angka agregat,

Teknologi informasi telah memberi banyak kemajuan bagi kehidupan manusia. Terlebih, makin meningkatnya pemanfaatan komputer dan internet dalam membantu memudahkan berbagai pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Lewat komputer dan perangkat lain yang menjadikannya produk pengembangannya termasuk gawai (gadget), segala jenis informasi bisa diakses dan disebarluaskan dengan mudah melalui jaringan internet.

Kemajuan teknologi pun terjadi seiring perkembangan zaman. Misalnya, teknologi internet, diperlukan kecakapan dan kemampuan untuk memahami sekaligus menggunakannya.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan internet dengan maksimal di ruang digital tanah air, diperlukan kebijakan dan kemampuan dari setiap pengguna gawai dalam mengendalikan informasi yang mereka dapat di jaringan internet.

Apalagi, tantangannya makin besar saat ini. Konten-konten negatif terus bermunculan, kejahatan online meningkat, adanya hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, dan radikalisme berbasis digital patut diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam perkembangannya, tidak semua informasi yang tersebar luas di internet menjadi positif. Tak sedikit pula berisi informasi minus. Beberapa tantangan media digital menjadi masalah tantangan serius, seperti penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan aktivitas digital yang merugikan lainnya. Salah satu penyebab fenomena tersebut yakni kurangnya kesadaran keamanan siber karena rendahnya kemampuan literasi digital (UNESCO, 2018).

Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dan kemampuan dari setiap pengguna gadget dalam mengendalikan informasi yang didapat di jaringan internet. Hal itulah yang mendasari Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan hasil survei Indeks Literasi Digital Tahun 2022.



Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel A Pangerapan menyatakan, Status Literasi Digital Indonesia pada 2022 mengalami kenaikan menjadi 3,54 dibandingkan dengan 2021 yaitu 3,49. Skor tersebut menunjukkan bahwa Literasi Digital masyarakat Indonesia berada pada kategori sedang. Kenaikan itu lebih dominan dalam aspek budaya digital dan etika digital. Menurutnya, untuk aspek keamanan digital masih membutuhkan perhatian dan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Jika dibandingkan 2021, hasil survei Indeks Literasi Digital Kominfo 2022 terdapat peningkatan sekitar nol koma nol lima poin. Dari sebelumnya 3,49 sekarang sudah mencapai 3,54 angka agregat,” jelasnya dalam Peluncuran Status Literasi Digital Indonesia 2022 yang berlangsung secara hibrida dari Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Rabu (01/02/2023).

Literasi digital di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari pemanfaatan teknologi digital yang belum maksimal, sikap negatif para netizen, sampai kasus-kasus kriminalitas yang terjadi akibat kurangnya kesadaran keamanan digital.

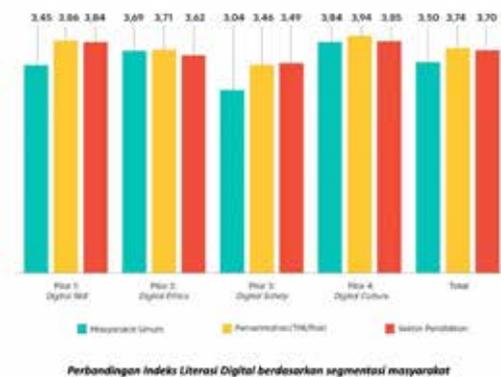
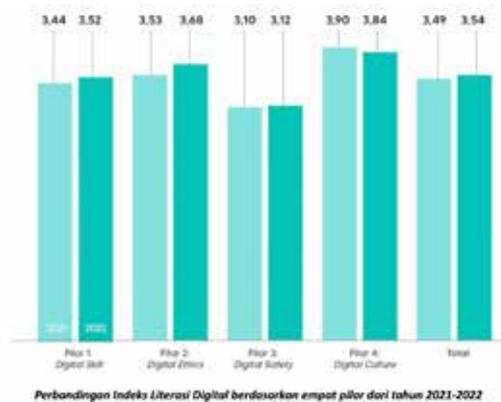
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan mempertajam Gerakan Nasional Literasi Digital melalui indeks literasi digital yang sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir. “Dengan gerakan ini, kami ingin memantau sejauh mana tingkat literasi digital di masyarakat,” ujar Dirjen Aptika.

Berdasarkan keterangan dalam Report Survey Literasi Digital 2022, survei bertujuan guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti dan pengaruhnya terhadap penyediaan program-program yang tepat untuk peningkatan tingkat literasi digital penduduk Indonesia. Sehingga diperlukan satu studi mendalam agar bisa mengukur kemampuan literasi digital Indonesia dari berbagai sudut pandang. Survei ini merupakan salah satu pendekatan untuk menjawab kebutuhan tersebut yang diharapkan menjadi rujukan utama dalam penentuan status literasi digital di Tanah Air.

Semuel menyebutkan, sejak pertama kali survei ini dilaksanakan, indeks literasi digital masyarakat Indonesia selalu mengalami peningkatan kendati cukup minim. Pada medio 2020 dua tahun lalu misalnya, indeks literasi digital Indonesia mencapai

3,46, naik tipis menjadi 3,49 pada 2021, dan mengalami peningkatan 0,05 poin ke angka 3,54 setahun setelahnya.

“Kita inginnya nanti bisa mencapai (indeks) 4. Memang tertatih, tapi harapannya bisa meningkat bahkan sampai 0,10 poin,” harapnya.



Pengukuran Indeks Literasi Digital dilakukan melalui survei tatap muka yang dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2022. Penentuan sampel survei menggunakan multistage random sampling dengan pendekatan home visit di area survei. Total responden pada pengukuran Indeks Literasi Digital tahun ini berjumlah 10.000 orang dengan Margin of Error (MoE) +/- 0,98% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang diikutkan dalam penentuan sampel adalah anggota rumah tangga berusia 13-70 tahun, serta mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.

Dirjen Aptika Kominfo menyebutkan, pengukuran dengan Kerangka Indeks Literasi Digital 2022

menggunakan empat pilar yaitu Kecakapan Digital (Digital Skill), Etika Digital (Digital Ethics), Keamanan Digital (Digital Safety), dan Budaya Digital (Digital Culture). Budaya Digital memiliki skor tertinggi yaitu (3,84), diikuti Etika Digital (3,68), Kecakapan Digital (3,52) dan Keamanan Digital (3,12).

“Hasil survei ini jadi pijakan kami dalam melakukan pemetaan target sasaran serta pemetaan kebutuhan literasi digital masyarakat, agar Program Nasional Literasi Digital dapat dieksekusi secara efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Secara umum tujuan dan saran survei ini adalah untuk memperoleh gambaran terhadap situasi literasi digital di Indonesia. Secara khusus survei ini memiliki tujuan dan saran sebagai berikut:

- Menyesuaikan kerangka (framework) agar lebih sejalan dengan Roadmap Literasi Digital 2020-2024 (Kominfo, 2020).
- Memberikan gambaran umum tentang pola penggunaan teknologi dan media digital berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
- Memahami kemampuan masyarakat untuk mengenali hoaks (informasi bohong) dan membantu perumusan strategi pengendalian hoaks.
- Memahami pola masyarakat Indonesia dalam menjaga data pribadi dan kesiapan menghadapi berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
- Memberikan gambaran bahwa literasi digital dapat membantu meningkatkan produktivitas bekerja dan belajar.
- Mendapatkan informasi tingkat literasi digital Kalimantan Timur dalam menghadapi beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Mendapatkan status literasi digital di Kawasan 3T
- Sementara itu, kegiatan ini merupakan

penyelenggaraan riset kuantitatif dengan cara survei tatap muka di 34 provinsi di Indonesia dan analisis data status literasi digital serta memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi digital di Tanah Air. Survei dilakukan dengan ketentuan:

- Masyarakat Indonesia yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir dan berumur antara 13-70 tahun.
- Pemilihan acak dengan mempertimbangkan jumlah wilayah kota dan perdesaan

Dirjen Aptika Kominfo mengungkapkan survei ini juga menyoroti beberapa temuan, seperti munculnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah dengan literasi digital tertinggi, yakni mencapai skor 3,64 diikuti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Barat di urutan berikutnya.

Menurut Samuel, hasil ini membuktikan bahwa literasi digital daerah di Pulau Jawa dan di luar Jawa tidak terlalu timpang. "Jadi memang fasilitas (digital) tidak menjadi kunci (literasi digital) Untuk daerah yang masih mendapat indeks rendah, berarti upaya literasi digital dari kami harus lebih masif lagi," katanya.

Berdasarkan hasil survei, kenaikan dengan skor tertinggi dialami oleh Maluku Utara yang mencapai 0,36; sedangkan daerah dengan penurunan tertinggi berada di provinsi Bangka Belitung, dengan penurunan mencapai 0,36, sementara Gorontalo menurun 0,26 poin dan Sulawesi Barat 0,24 poin.

Survei Indeks Literasi Digital 2022 ini dilakukan di 34 Provinsi yang mencakup 514 Kabupaten/Kota, dengan 10 ribu responden yang disurvei secara tatap muka berdasarkan metode multistage random sampling. Adapun Margin of Error survei yang dilakukan pada Agustus-September 2022 sekitar 0,98 persen dengan interval kepercayaan 95 persen.

Menurut Samuel, hasil survei juga menunjukkan upaya peningkatan literasi digital masyarakat di setiap provinsi, hal itu dibutuhkan agar program literasi digital bisa tepat sasaran.



"Tujuan pengukuran ini untuk mengetahui pemahaman literasi digital masyarakat di Indonesia. Kita ingin tahu petanya di mana saja yang perlu dilakukan literasi digitalnya untuk ditekan lebih masif lagi," tuturnya.

Semuel menjelaskan, literasi digital ini terbagi menjadi tiga segmen, yaitu pendidikan, pemerintahan (TNI dan Polri) dan masyarakat umum. Jika dilihat di segmen Pendidikan, 3,70. Sedangkan segmen pemerintahan 3,74 dan di segmen masyarakat umum 3,50.

"Jadi, kami dalam melaksanakan ini bekerjasama dengan katadata dan saat ini telah memasuki tahun ketiga melakukan survei. Harapannya, kita bisa mengukur bagaimana tingkat literasi digital masyarakat dan kita bisa menyikapi bagaimana kita melakukan literasi kepada masyarakat," ungkapnya.



Tujuan
pengukuran ini untuk mengetahui pemahaman literasi digital masyarakat di Indonesia. Kita ingin tahu petanya di mana saja yang perlu dilakukan literasi digitalnya untuk ditekan lebih masif lagi.





Empat Pilar Utama Jadi Landasan Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024 (Kominfo, 2020). Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture:

- Digital Skill atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
- Digital Ethics atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.
- Digital Safety atau keamanan digital adalah kemampuan user (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
- Digital Culture atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.



Tabel. 1. Pilar G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy: Framework and Approach (CSIS,2022)

Pilar	1. Infrastructure & ecosystem	2. Literacy	3. Empowerment	4. Jobs
Elemen	a) Adopsi dan akses Sektor TIK b) Pembelajaran dan Inovasi	a) Komplementaritas b) Kedekatan c) Keamanan	a) Pengguna/ Konsumen b) Penyedia/Penjual	a) Kebutuhan Digital Skill b) Kesiapan Digital Skill
Jumlah Indikator	6	6	9	11

Selain itu, penelitian ini menyesuaikan dengan G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and digital Literacy: Framework and Approach (CSIS, 2022) dalam pengukuran berikut:

- Pilar Empowerment yang mengukur kemampuan masyarakat dalam penggunaan digital finance dan marketplace melalui pilar Digital Skill dalam survei Indeks Literasi Digital 2022.
- Pilar Literacy yang diukur berdasarkan elemen komplementaritas (komunikasi dan pemikiran kritis), kedekatan (kebiasaan responden dalam menggunakan data dan perangkat TIK), dan keamanan (kebiasaan responden dalam melindungi perangkat dan informasi personal) merupakan representasi dari pilar Digital Skill, Digital Culture, dan Digital Safety dalam Survei Literasi Digital 2022.

Dari informasi di atas, keempat pilar utama diturunkan menjadi 30 (tiga puluh) indikator yang merepresentasikan masing-masing pilar (Tabel 2). Dalam perkembangannya, pilar yang digunakan pada tahun 2022 merupakan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, berupa perubahan minor dalam penyusunan pertanyaan indikatornya.

Pilar	Indikator
Digital Skill	1. Saya bisa menghubungkan perangkat saya ke jaringan internet
	2. Saya bisa mengunduh file/aplikasi
	3. Saya bisa mengunggah file
	4. Saya bisa mencari dan mengakses data, informasi dan konten di media digital.
	5. Saya memiliki kemampuan menyimpan data, informasi, dan konten dalam media <u>digita</u>
	6. Saya terbiasa mencari tahu apakah informasi yang saya temukan di situs web benar atau salah.
	7. Saya terbiasa mencari tahu apakah informasi yang saya temukan di situs web benar atau salah.
	8. Saya mampu berinteraksi melalui berbagai perangkat komunikasi teknologi digital
	9. Saya terbiasa belanja melalui loka pasar.
Digital Ethics	1. Saya tidak mengunggah foto bersama anak orang lain
	2. Saya tidak menandai teman saat mengunggah konten tanpa perlu memberi tahu teman saya tersebut
	3. Saya tidak akan berkomentar kasar jika ada orang yang komentar negatif di unggahan saya
	4. Saya tidak akan berkomentar kasar jika ada orang yang komentar negatif di unggahan saya
	5. Saya tidak akan langsung <u>membagikan</u> informasi kecelakaan
	6. Saya tidak akan mengajak orang-orang untuk berkomentar negatif.
	7. Saya tidak akan membagikan tangkapan layar percakapan ke media sosia
Digital Safety	1. Di akun media sosial, saya bisa mengatur siapa saja yang dapat melihat <u>lini masa</u> saya
	2. Saya mengetahui cara melaporkan penyalahgunaan di jejaring sosial
	3. Saya dapat menonaktifkan opsi untuk menunjukkan posisi geografis.
	4. Saya tidak mengunggah data pribadi di media sosial
	5. Saya menggunakan aplikasi untuk menemukan dan menghapus virus di perangkat saya
	6. Saya bisa membedakan e-mail yang berisi spam/virus/malware.
	7. Saya terbiasa membuat password yang aman dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca.
	8. Saya melakukan back up data di beberapa tempat.

Pilar	Indikator
Digital Culture	1. Saya menyesuaikan cara berkomunikasi agar pihak kedua tidak merasa tersinggung.
	2. Saya mempertimbangkan perasaan pembaca yang berasal dari agama lain.
	3. Saya mencantumkan nama penulis saat repos
	4. Saya mempertimbangkan perasaan pembaca yang berasal dari suku lain.
	5. Saya berbagi seni budaya tradisional dan kontemporer Indonesia secara digital
	6. Saya mempertimbangkan perasaan pembaca yang memiliki pandangan politik berbeda.
	7. Saya selalu mempertimbangkan dan menyadari keragaman budaya di media sosial saat membagikan pesan.

Semuel menjelaskan, dalam pengukuran kerangka indeks literasi digital 2022 di atas, mengacu pada empat pilar utama, yakni Budaya Digital (Culture) yang secara umum mendapat skor tertinggi 3,84; Etika Digital (Ethics) 3,68 poin; Kecakapan Digital (Skill) di indeks 3,52; dan Keamanan Digital (Safety) yang paling rendah di angka 3,12 saja. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika itu, kegiatan berselancar di dunia maya sejatinya perlu didukung kemampuan melindungi keamanan pribadi, di tengah maraknya kejahatan digital.

“Ini sama saja seperti di dunia nyata. Kalau sudah penipuan, targetnya itu spesifik. Dengan kemampuan para penjahat ini memahami karakter kita lewat social engineering, data-data kita pun didapatkan untuk memperdaya kita,” ujarnya.



“Ini sama saja seperti di dunia nyata. Kalau sudah penipuan, targetnya itu spesifik. Dengan kemampuan para penjahat ini memahami karakter kita lewat social engineering, data-data kita pun didapatkan untuk memperdaya kita.”

Metode Penelitian

Adapun Survei Status Literasi Digital Indonesia melibatkan 10.000 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota responden dengan metode multistage random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan metode wawancara tatap muka secara langsung (face to face interview) dengan populasi target adalah warga negara Indonesia yang berusia 13 hingga 70 tahun dan mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.

Metode multistage random sampling atau acak bertingkat dilakukan di setiap provinsi mulai dari pemilihan kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, RT hingga Unit Tempat Kediaman (UTK). Sementara responden pada UTK dipilih secara acak menggunakan kish grid.

Sedangkan metode kish grid adalah metode pemilihan responden yang ditentukan dengan tabel bilangan. Metode ini ditemukan oleh Kish (1949) untuk menentukan sampel melalui tabel bilangan yang biasa digunakan dalam pengacakan sampel rumah tangga

Dengan kecakapan digital, masyarakat harus mengetahui gawai maupun aplikasi yang digunakannya, bahkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian, ruang digital juga harus diisi dengan budaya Indonesia yang sudah dibentuk berabad-abad oleh para leluhur kita, seperti budaya sopan, ramah, sampai tepo seliro. "Jangan sampai kita jadi split personality person, orang yang punya dia karakter," kata Samuel.

Terakhir, secara etika, masyarakat Indonesia harus menyadari untuk bisa menghormati kemanusiaan, baik di ruang fisik maupun digital. "Inilah yang nantinya akan dicapai melalui Gerakan Nasional Literasi Digital," tutur Dirjen Aptika Kominfo.



“**Jangan sampai kita jadi split personality person, orang yang punya dia karakter**”



Manfaat Survei Literasi Digital

Dirjen Aptika Kominfo mengatakan survei ini dilakukan secara berkelanjutan karena digitalisasi akan terus berkembang dan menyentuh berbagai lini kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, sampai pada gaya hidup. Hasil ini juga diperlukan pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan dengan berbagai strategi yang tepat sasaran dan efektif, demi peningkatan literasi digital.

Saat ini, program literasi digital pun sudah berjalan dengan berbagai sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media. "Contohnya soal APK yang belakangan marak memperdaya data-data di smartphone masyarakat, jangan diunduh, dia kan seperti program. Selain itu, jangan mengeksploitasi lansia, difabel dan anak-anak. Sudah ada 56 konten sosialisasi di TikTok, FB ada satu, dan IG ada 1," ujarnya.

Semuel menilai, tugas ini bukan hanya jadi tugas Kementerian Kominfo, namun juga lembaga lain, termasuk masyarakat. Namun, kemudahan ini harus

dibarengi dengan bagaimana memahami risiko-risiko yang timbul.

"Penipuan banyak terjadi. Literasi digital perlu ditingkatkan karena penahan terakhir adalah masyarakatnya. Kami di Kominfo juga melakukan pemblokiran, tapi hal-hal negatif masih saja terjadi di dunia digital," ujar Semuel.

Lebih lanjut, Dirjen Aptika menjelaskan, jika bicara literasi sebagai gerakan nasional, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua stakeholders terkait.

"Saat ini ada 120 lebih organisasi yang terlibat dari Gerakan Nasional Literasi Digital. Literasi tidak bisa berhenti dan harus selalu bergulir, karena selalu ada hal baru." terangnya.

Selain masyarakat, pemerintah menurut Dirjen Semuel, juga perlu ikut bertransformasi. Melalui Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2018 pemerintah mulai bertransformasi.

"Pemerintah mulai melayani masyarakat dengan aplikasi-aplikasi digital dan membangun Pusat Data Nasional, agar siap melayani masyarakat di era digital. Derap langkah antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha harus seirama," tandasnya.

Hasil pemetaan literasi digital Indonesia merupakan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan tingkat kecakapan dan pengetahuan digital, sekaligus memberikan gambaran kondisi dan peluang di setiap wilayah Tanah Air. Hasil survei literasi digital bisa diakses atau diunduh melalui laman ReportSurveiStatusLiterasiDigitalIndonesia2022.pdf (kominfo.go.id)



Pemerintah Terus Dorong Kenaikan Indeks Literasi Digital Masyarakat

Secara umum ada peningkatan dari aspek budaya digital (3,84) dan etika digital (3,68), namun dalam aspek indeks keamanan (digital safety) masih perlu diperhatikan karena masih rendah.

Hasil survei Indeks Literasi Digital Tahun 2022 baru saja diluncurkan pada awal Februari ini oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Katadata Insight Center (KIC). Hasil survei menyebutkan bahwa terdapat peningkatan indeks literasi digital, terutama dalam aspek budaya dan etika digital.

"Hasil survei Indeks Literasi Digital Kominfo 2022 terdapat peningkatan sekitar 0,05 poin. Dari sebelumnya 3,49 sekarang sudah mencapai 3,54 angka agregat. Secara umum ada peningkatan dari aspek budaya digital (3,84) dan etika digital (3,68), namun dalam aspek indeks keamanan (digital safety) masih perlu diperhatikan karena masih rendah," jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel A. Pangerapan dalam Peluncuran Status Literasi Digital Indonesia 2002 yang berlangsung secara hibrida dari Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Rabu (01/02/2023).

Survei Indeks Literasi Digital Nasional ini sudah tiga kali dilakukan sejak tahun 2020, disebut Dirjen Samuel selain untuk mengetahui status literasi digital, juga untuk menunjukkan upaya peningkatan literasi digital masyarakat di setiap provinsi. Survei ini dilakukan untuk membangun kerangka (framework) untuk mengukur literasi digital di 34 provinsi di Indonesia, sehingga bisa memberikan pemahaman yang objektif, terukur dan representatif.

Dirjen Samuel menyatakan bahwa hasil survei ini juga menunjukkan upaya peningkatan literasi digital masyarakat di setiap provinsi. "Tujuan pengukuran ini untuk mengetahui pemahaman literasi digital



masyarakat di Indonesia. Kita ingin tahu petanya di mana saja yang perlu dilakukan literasi digitalnya untuk ditekan lebih masif lagi,” tandasnya.

Literasi digital diartikan sebagai kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi dan menyusun informasi yang jelas melalui tulisan dan media lain di berbagai platform digital atau jejaring internet. Untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membentuk Road Map Literasi Digital 2021 - 2024. Di dalamnya ada kerangka kerja yang dipakai merancang program dan kurikulum Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) 2021 – 2024.

GNLD sebagai suatu gerakan nasional yang dilakukan Kementerian Kominfo bersama Siberkreasi serta berbagai organisasi dan stakeholder terkait menjadi gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia, dan menysasar pada tiga segmen yaitu segmen pemerintahan, segmen pendidikan, dan segmen masyarakat umum. Program tersebut memiliki target 50 juta masyarakat Indonesia terliterasi sampai dengan tahun 2024.

Selain itu Program Literasi Digital Nasional dinilai menjadi suatu keharusan di tengah semakin banyaknya pengguna internet, akan banyak juga ancaman kejahatan yang terjadi di dunia digital yang perlu diwaspadai bersama. Namun ditambahkan Dirjen Samuel bahwa literasi digital ini merupakan gerakan yang tidak bisa dikerjakan oleh satu institusi, semuanya harus terlibat. Karena dalam transformasi digital semua orang harus

dibekali dan mampu bertransformasi sehingga tidak ada yang tertinggal.

Di dalam literasi digital terdapat 4 (empat) pilar/ kerangka yaitu cakap digital (digital skills), etika digital (digital ethics), keamanan digital (digital safety), dan budaya digital (digital culture). Keempat pilar ini merupakan komponen ideal dalam mendefinisikan kemampuan literasi digital masyarakat.

4 Pilar Literasi Digital

Penguatan literasi digital melalui empat pilar literasi digital yaitu cakap digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital menjadi komponen ideal untuk terbentuknya kemampuan literasi digital masyarakat, juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat di ruang digital untuk mendukung transformasi digital. Selain itu keempat pilar ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman mengenai perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pilar pertama, Digital Skills (cakap digital) diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Cakap digital juga berkaitan dengan kecakapan dalam memahami TIK dari segi perangkat lunak dan keras serta sistem operasi digital.

Melalui cakap digital, pelajar atau mahasiswa bisa memaksimalkan teknologi dan perangkat digital seperti penggunaan aplikasi Canva untuk membuat modul atau presentasi atau memanfaatkan aplikasi lainnya yang bisa mempermudah pekerjaan. mempercepat proses pekerjaan dan efisiensi dari sisi biaya dan waktu. Penguasaan beberapa platform digital akan sangat membantu masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.

Penekanan digital skills terletak pada kompetensi teknis dalam pengoperasian teknologi digital selain pengetahuan perangkat lunak dan keras, juga terkait mesin telusur (search engine); aplikasi chat dan media sosial; juga aplikasi dompet digital dan e-commerce.

Kedua Digital Culture (budaya digital), merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Budaya digital juga tercermin lewat cara berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi di dunia digital. Budaya digital juga dikaitkan dengan kemampuan membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital.

“Dasarnya adalah banyak masyarakat yang merasa ruang digital tidak ada aturannya, berbeda ketika di ruang fisik yang memiliki tata krama. Kita ingin tumbuhkan kembali bahwa ruang digital dan fisik tidak berbeda,” tambah Dirjen Samuel.

Selanjutnya, Digital Ethics (etika digital) yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette). Bijak dalam bermedia sosial dan memahami penggunaan layanan digital sangat diperlukan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga diperlukan kemampuan untuk menyadari, menyesuaikan, mempertimbangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan.

Penekanan digital ethics meliputi (1) Pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet (netiquette); (2) Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan dengan seperti pornografi, perundungan, dll; (3) Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku; (4) Pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terakhir, Digital Safety (keamanan digital), yaitu kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Juga kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital.

Pada pilar digital safety penekanannya pada kemampuan untuk melindungi data dan

identitas digital. Dimana terdapat 4 dasar yaitu (1) pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras (kata sandi, fingerprint), dan pengetahuan dasar memproteksi identitas digital (kata sandi); (2) pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam, phishing; (3) pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed; terakhir (4) pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan (scam) dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode otentikasi.

Literasi digital merupakan suatu gerakan bersama yang tidak bisa dikerjakan oleh satu institusi, semua pihak terkait harus terlibat seperti kolaborasi dengan Kementerian terkait, Pemerintah Daerah, Mitra Pelaksana (Stakeholder). Upaya mewujudkan transformasi digital memerlukan dukungan dan kerja sama semua pihak agar seluruh masyarakat bisa bertransformasi sehingga tidak ada yang tertinggal. Di samping itu juga penguasaan atas empat pilar digital diharapkan mampu membuat masyarakat memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan internet dan teknologi secara aman, beretika dan optimal.



GDPR
GENERAL
DATA PROTECTION
REGULATION



Lindungi Keamanan Pribadi, Kominfo: UU PDP Atur Hak Pemilik Data Pribadi

Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan pentingnya melindungi data pribadi masyarakat di ruang virtual. Maraknya kebocoran data pribadi dan rendahnya literasi digital di Indonesia mendorong Pemerintah untuk terus berupaya menciptakan ruang digital yang aman melalui pengesahan UU PDP.

Berdasarkan hasil survei dari Kata Data dan Kominfo, Indeks Literasi Digital di Indonesia belum sampai pada level “baik”. Dari hasil survei tersebut, Sub-indeks Informasi & Literasi Data memiliki skor yang paling rendah. Responden di wilayah tengah skornya lebih tinggi daripada barat dan timur.

Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abriyani Pangerapan, telah disahkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust) yang merupakan kunci di ruang digital karena merupakan dunia baru.

“Di ruang fisik kita sudah bangun trust karena dapat bertatap muka, bagaimana membangun trust di ruang digital? Salah satunya dengan UU PDP ini,” ungkapnya.

Dalam melakukan aktivitas di ruang digital masyarakat memberikan data, dan dengan adanya UU PDP maka dapat memberikan perlindungan. UU PDP mengatur bahwa organisasi yang mengumpulkan data pribadi wajib untuk melindungi data tersebut termasuk meningkatkan sistem cyber security-nya.

Untuk itu Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan aturan pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Wacana tersebut lahir pasca RUU PDP disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.



Dengan disahkannya RUU PDP, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo akan melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola data pribadi oleh para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

“Mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing,” jelas Menkominfo, Johnny G. Plate saat memberikan penjelasan kepada insan pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/09/2022) yang lalu.

Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan aturan pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Terkait hal tersebut, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi menyatakan akan melibatkan publik dalam penyusunan aturan pelaksana tersebut.

“Kami akan menggelar diskusi publik dengan tema Implementasi Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi pada masing-masing sektor,” ujarnya dalam acara Diskusi Persiapan Pelaksanaan Diskusi Publik kepada Asosiasi di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Selasa (07/02/2023)

Menurutnya, masukan dari berbagai pihak sangat penting dalam penyusunan aturan pelaksana UU PDP, terutama yang berkaitan dengan implementasi, tantangan, hambatan dan kebutuhan masing-masing sektor.

“Secara kontekstual maupun penyelenggaraan, penerapan dan penegakan pelindungan data pribadi perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang oleh semua pihak,” tandasnya.

Diskusi publik rencananya akan melibatkan 200 peserta yang hadir dari berbagai sektor, seperti sektor perbankan, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, e-commerce, hospitality, transportasi dan pemerintahan.

“Dengan hadirnya sektor-sektor tersebut, kami mengharapkan mendapat banyak masukan terkait implementasi UU PDP ke depannya” tandas Plt. Direktur Teguh.

Libatkan Asosiasi Secara Aktif

Kementerian Kominfo juga terus berupaya untuk memperkuat pelaksanaan pengaturan dalam UU PDP dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Kementerian Kominfo memerlukan masukan dalam penyusunan aturan pelaksanaan berkaitan dengan UU PDP. Karena setiap sektor itu punya karakteristik, bisnis model, dan bisnis prosesnya tersendiri. Inilah yang sebenarnya kita harapkan juga para sektor atau asosiasi,” ungkap Dirjen Samuel Pangerapan dalam Diskusi Publik Implementasi UU PDP di Masing-Masing Sektor, Bekasi, Kamis (16/02/2023).

Oleh karena itu, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo mengharapkan setiap perwakilan asosiasi dapat menyumbangkan pendapat dan pandangan sebagai masukan yang komprehensif untuk

keberlangsungan penyusunan aturan pelaksanaan dari UU PDP.

“Juga bisa ditindaklanjuti untuk kita ejawantahkan dalam aturan pelaksanaan yang sedang kita susun, semoga hasil dari diskusi ini bisa bermanfaat dalam implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia,” ungkapnya.

Beberapa perwakilan asosiasi yang turut hadir dalam diskusi publik tersebut antara lain Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan, Doni Hendrawan; Associate Director Data Privacy and Protection Deloitte, Eryk Budi Pratama; dan Head of Data Privacy Tokopedia, Irene Suryadi. Sesi diskusi berlangsung dua sesi yang diikuti peserta dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik dan privat.





HPN 2023 Upaya Lahirkan Publisher Right untuk Pers Indonesia

Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati tanggal 9 Februari setiap tahunnya selalu melahirkan pikiran dan gagasan yang terbaru dari elemen pers nasional. Peringatan HPN tidak saja dirasakan oleh insan pers, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan dan kebebasan berserikat. Seperti pada peringatan HPN 2023 yang mengusung tema **Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat**.

Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak HPN di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, 9

Februari 2023 memberikan apresiasi kepada insan pers atas peran dan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Awak pers bagi Kepala Negara adalah pilar bangsa yang terus menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, inovasi pembangunan hingga menjadi penopang utama demokratisasi.

Presiden Jokowi menceritakan kedekatannya dengan insan pers selama karirnya di pemerintahan, baik saat menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI. "Saya ke sana-ke mari, runtang-runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan, dengan rekan-rekan

wartawan. Terbukti insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya menjadi presiden,” tutur Presiden Jokowi.

Selain mengisahkan kedekatannya, Presiden Jokowi juga menaruh perhatian serius terhadap tantangan yang dihadapi media massa saat ini di tengah disrupsi media baru over the top. Menurut Kepala Negara, dunia pers sedang tidak baik-baik saja disebabkan isu utama bukan lagi mengenai kebebasan pers melainkan pemberitaan yang bertanggung jawab.

Oleh karenanya, pers dewasa ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Dengan artian, setiap orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Atas dasar itulah Presiden Jokowi meminta untuk mempercepat regulasi Publisher Rights atau hak cipta jurnalistik.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Indonesia menghadapi tantangan di tahun 2022 dengan baik. Menurut Menkominfo, keberhasilan itu juga disokong peran insan pers dan media di Indonesia dalam membagikan optimisme di kalangan masyarakat.

“Berbagai tantangan di tahun 2022 yang lalu telah kita lalui dengan baik dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Mulai dari penanganan pandemi Covid-19, keberhasilan Presidensi G20 yang mendapat apresiasi dari para pemimpin dunia, masyarakat domestik, hingga keberhasilan resiliensi melalui leadership yang kuat dari Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya dalam Konvensi Nasional Media Massa sebagai rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Medan, Sumatera Utara, Rabu (08/02/2023).

Menurut Menkominfo semua capaian itu memungkinkan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi nasional kita mencapai 5,1% kumulatif (c-to-c) lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 3,7%. Di saat tahun yang begitu berat pun kita mempunyai hasil

pertumbuhan ekonomi nasional cukup tinggi,” ungkapnya.

Menteri Johnny menegaskan pencapaian tersebut dan tanaman tersebut turut didukung oleh iklim demokrasi yang tentunya didukung oleh pilar demokrasi yaitu oleh pers, jurnalisme dan media. Hal itu berlangsung melalui penyebaran informasi yang akurat.

“Media pers dan jurnalisme memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatasi persoalan baik global maupun nasional dalam menghadapi pandemi covid-19 misalnya hasil riset WHO yang menyebut peran pers dalam mempengaruhi persepsi masyarakat yakni menghilangkan rasa takut, memegang kendali dalam proses produksi dan diseminasi informasi terkini terkait penelusuran pencegahan penyebaran Covid-19, promosi protokol kesehatan bahkan mempengaruhi proses pembuatan dan pengambilan kebijakan kebijakan publik seiring dengan kemajuan teknologi,” jelasnya.

Atas berbagai pencapaian itu, Menkominfo mendorong kepada semua pihak agar tetap menggelorakan sikap optimisme di tahun 2023 dalam menghadapi tantangan selanjutnya. Terlebih lagi perekonomian Indonesia diprediksi oleh lembaga dunia terus bertumbuh.





“Optimisme dengan penuh kewaspadaan karena persoalan dunia belum berakhir. Namun optimisme itu juga diteropong, dilihat, dianalisis oleh lembaga-lembaga dunia. Seperti International Monetary Fund (IMF) memprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 4,8% lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi global di kisaran 2,9%. Bahkan kita bersama meyakini tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi nasional kita akan di atas 5,1%,” ungkapnya.



Insan Pers Harus Jalankan Fact Checking

Upaya menjaga ruang digital yang bersih dan bermanfaat penting menjadi perhatian ekosistem pers di tanah air, baik media konvensional maupun media over the top. Untuk itu Menkominfo mendorong insan pers dan media untuk memanfaatkan teknologi digital guna menjalankan fungsi pemeriksaan fakta atau fact checking.

“Tantangan terkait penyebaran disinformasi, misinformasi, malinformasi yang kian marak di ruang digital. Kita sama-sama ketahui itu, kita sama-sama pahami itu, (saya harap) kita sama-sama mendiskusikan, membicarakan, dan menjadi concern kita bersama, karena itu nyata hadir dalam berbagai bentuk, termasuk clickbait,” ungkapnya dalam Konvensi Nasional Media Massa sebagai rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Medan, Sumatera Utara, Rabu (08/02/2023).

Seiring dengan kemajuan teknologi, momentum perkembangan transformasi digital menghadirkan peluang yang besar bagi industri pers, salah satunya melalui teknologi Artificial Intelligence (AI).

“Penggunaan AI oleh Associated Press Amerika Serikat, misalnya telah mampu menghasilkan jumlah produksi artikel sebesar 12 kali lipat dari sebelumnya. Pemanfaatan AI ternyata mendorong

peningkatan produksi artikel 12 kali lipat atau 1.200 persen,” jelas Menkominfo.

Menurut Menteri Johnny, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi fact checking sejalan dengan kerja jurnalistik. Namun, hal itu perlu diimbangi dengan kemampuan dan kecepatan beradaptasi oleh insan peers.

“Fungsi fact checking yang sangat penting sekali agar masyarakat bisa tahu, media bisa membantu melalui fact checking dengan menggunakan teknologi digital, memproses analisis data numerik, menganalisis social network hingga mengoptimalkan biaya variabel lain dalam berbagai kinerja jurnalis,” tuturnya.

Menkominfo mengapresiasi pers bebas yang telah berkembang sangat baik saat ini di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo dan insan pers akan terus bersama-sama menjaga dengan penuh tanggung jawab.

“Kami terus aktif berkoordinasi dengan Dewan Pers menjalankan patroli siber dalam menangani konten negatif dan disinformasi yang tersebar di ruang digital sehingga dapat mewujudkan ekosistem digital yang aman yang nyaman dan produktif bagi seluruh rakyat,” tandasnya.



Minta Dewan Pers Siapkan Peta Jalan

Dalam rangkaian kegiatan HPN 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga kerap menyinggung terkait dengan publisher rights. Seperti pada sesi diskusi Konvensi Nasional Media Massa.

Menurut Menteri Johnny, keberadaan payung hukum terkait dengan media sustainability akan dapat mendorong level of playing field yang lebih fair dan menghasilkan konvergensi usaha industri media. Dewan Pers dan konstituen juga diminta menyiapkan roadmap atau peta jalan sehingga penerapan payung hukum Publisher Rights dapat merespons perkembangan jurnalisme digital dengan baik.

“Setelah proses panjang sudah beberapa kali HPN, kita berdiskusi tentang aspek bisnis dari pers jurnalisme dan media yang sampai pada satu titik dibutuhkan adanya payung hukum yang dikenal dengan publisher rights untuk menjaga konvergensi dan membangun playfield yang lebih seimbang,”

Menurut Menkominfo, dalam menghadapi konvergensi dan menerapkan media sustainability, pers dan jurnalisme perlu mengadopsi teknologi digital. Oleh karena itu, Menteri Johnny mendorong

Dewan Pers untuk menyiapkan peta jalan.

“Jangan hanya telepon seluler saja yang 5G, tetapi media khususnya media penyiaran juga perlu mengadopsi integrated broadcast broadband.

Sejalan dengan adaptasi terhadap teknologi, Menkominfo juga mengingatkan agar penerapan jurnalisme perlu memperhatikan perspektif digital.

“Untuk menjaga lingkungan sekitar yang seimbang, perlu juga menempatkan jurnalisme dan media dalam perspektif baru perspektif digital,” tandasnya.

Menteri Johnny juga mengapresiasi peran akademisi dan mitra ekosistem pers dalam merumuskan regulasi berkaitan dengan publisher rights.

“Proses pembuatan peraturan legislasi kita akan lewati bersama saya berharap proses ini dilakukan dengan lebih cepat karena kita sudah streamline isu dan mengajak untuk partisipasi stakeholders yang lebih aktif sehingga bisa mempunyai meeting point, titik simpul yang sama,” harapnya.

Dukungan Kominfo untuk F1 Powerboat Seri Pertama Indonesia

Indonesia menjadi tuan rumah salah satu ajang balap internasional F1 Powerboat (F1 H2O) untuk pertama kalinya. Ajang balap kapal super cepat di air itu berlangsung di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, Provinsi Sumatra Utara, pada 24 s.d. 26 Februari 2023.



Kejuaran dunia kapal super cepat atau F1 Powerboat yang dilaksanakan di DPSP Danau Toba ini menjadi pembuka dari seri 2023. Selama lima tahun ke depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah salah satu rangkaian kegiatan F1 Powerboat yang berlangsung di kawasan DPSP Danau Toba.

Untuk mendukung perhelatan internasional tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun infrastruktur telekomunikasi digital di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan bersama operator telekomunikasi telah membangun jaringan fiber optic sepanjang 1.064 Km yang membentang di 22 dari 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Toba. Bahkan event internasional itu juga didukung dengan jaringan 5G.

"Disiapkan pula kapasitas unduh berkecepatan 100 Mbps, dengan kapasitas yang tersedia 1 Gbps," jelasnya dalam Konferensi Pers di Media Center F1 Powerboat, Lapangan Sisingamangaraja, Kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sabtu (25/02/2023).

Selain itu, Kementerian Kominfo juga telah menyediakan optical distribution point atau ODP sebanyak 610 titik yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Toba.

"Sama juga dengan kecepatan unduhnya 100 Mbps dan kapasitas yang tersedia 1 Gbps," tegas Menteri Johnny.

Masih di wilayah Kabupaten Toba, Menkominfo menyatakan sudah tersedia jaringan covered sinyal seluler yang didukung dengan jaringan Base Transceiver Station (BTS). Sebanyak 971 BTS 2G, 339 BTS 3G, dan 1.979 BTS 4G.

"Coverage sinyal seluler tersedia, juga 5G Xperience 4 BTS. Jadi kegiatan F1 PowerBoat Danau Toba juga didukung dengan sinyal seluler 5G," tandasnya.

Menteri Johnny menjelaskan penyediaan kapasitas yang besar disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan pengguna selama event berlangsung.

“Kapasitasnya sangat besar yang disediakan, nanti tergantung kepada penggunanya. Penyelenggara yang menggunakannya berapa banyak, tetapi kapasitasnya cukup besar,” jelasnya.

Menkominfo berharap semua infrastruktur telekomunikasi itu akan memberikan kemudahan bagi pekerja media, membantu memperlancar komunikasi pemberitaan, maupun aktivitas komunikasi pengunjung F1 Powerboat Danau Toba.

“Sekali lagi kita harapkan penyelenggaraan F1 Powerboat pertama kali ini berlangsung sukses besok. Karena tokoh nasional, Bapak Presiden Joko Widodo hadir. Marilah kita jaga agar semuanya berlangsung dengan baik, sukses, dan lancar. Sekali lagi, Danau Toba tampil di tingkatan tatanan Global melalui F1 PowerBoat,” ajaknya.



Ratusan Grup Media Hadir Meliput

Kementerian Kominfo juga telah layanan untuk 101 grup media yang akan meliput event yang pertama kali berlangsung di Indonesia.

“Jumlah media yang telah mendaftar dan akan ikut serta di dalam mengambil bagian pemberitaan kegiatan F1H2O Powerboat Danau Toba sebanyak 101 media. Jumlah itu terdiri dari media internasional atau media global sebanyak 40. Jadi ini secara khusus datang langsung meliput untuk ke F1 powerboat. Sebanyak 23 media nasional dan 38 media lokal atau seluruhnya 101 media,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Media Center F1 Powerboat, di Lapangan Sisingamangaraja, Kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Sabtu (25/2/2023).

Menteri Johnny merinci media internasional itu terdiri dari Abu Dhabi Media Group, American Boating Channel, ASTRO, CNBC, Corporation Katalana, Stars 4 China, Dubai media Inch, EGDA Sports, Projective Sports atau Action

Sport World, Extreme International, Europe Vision Sport News, Novachris, GP1, Ax's Slovakia, Match TV, Motor Vision, Mundonatical Channel, Outdoor Sport Channel, Euro Sport, Reaction Sport, Sport Channel Network, Sport TV Asia, Viasat Nordic, Vodafone Zigo, Via Play, Sport Media Set, Eleven Sport, Discovery Channel, World of Speed Magazine, Power Boating World, Abu Dhabi Media, Al-Jazeera English, Anadoru Agencies, Tsinghua Agencies, Shochu Valent, Maverick Team Media Representative, Human Racing Media Sport, China Team Media Representative, dan Sweden Media Representative.

“Jadi ada 40 media internasional dengan jumlah wartawan sebanyak 44 wartawan, media nasional, 56 wartawan, dan media lokal sebanyak 52 wartawan atau total 152 wartawan ditambah dengan 13 humas kementerian/lembaga dan daerah dengan jumlah pejabat atau petugas humas sebanyak 97 orang,” tuturnya.

Untuk media lokal, tercatat ada Berita Satu, CNN Indonesia TV, Detik.com, Harian Kompas, Inews.id, Infopublik.id, jpnn.com, Kompas.id, Liputan6.com, LKBN Antara TV, Metro TV, MNC Portal Indonesia, Radio Sonora, RRI, SCTV, Indosiar, SEA Today, Sindonews.com, TV One.

Guna melayani kebutuhan jurnalis, Kementerian Kominfo telah mempersiapkan dua media center yang berada di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu dan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Toba.

“Kementerian Kominfo, secara khusus dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, memberikan dukungan penuh, dukungan yang sangat kuat akan kesuksesan penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba yang pertama ini,” tandas Menkominfo.

Menteri Johnny mengharapkan keberadaan dua media center itu akan membantu seluruh

masyarakat Indonesia, warga asing, hingga para awak media mendapat kemudahan dalam melakukan peliputan kejuaraan dunia F1 PowerBoat.

“Memang wilayah sini sangat terbatas, sambil media membutuhkan space yang sangat besar karena melibatkan banyak peralatan dan wartawan, sehingga kita perlu sediakan dua tempat,” ujarnya.

Menkominfo mengharapkan, pemberitaan F1 Powerboat Danau Toba ini akan menjangkau 180 juta viewers internasional atau viewers global. Hal ini sejalan dengan target penyelenggaraan.

“Target penyelenggaraan juga untuk menjangkau 180 juta viewers internasional. Target itu, mudah-mudahan memberikan kesan tersendiri dan khususnya terkait dengan kepariwisataan Indonesia, keindahan Danau Toba,” ungkapnya.



Kominfo Percepat Penyusunan Rancangan Perpres Publisher Rights



Pemerintah mendukung upaya Dewan Pers dan komunitas media menciptakan ekosistem dengan kompetisi yang adil (fair level playing field) melalui pengaturan hak penerbit (publisher rights).

Dalam puncak acara Peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2022 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan dukungan atas perumusan regulasi hak penerbit atau publisher rights. Presiden Joko Widodo mengarahkan agar Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur Publisher Rights segera diselesaikan dalam waktu satu bulan sejak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2023.

Menindaklanjuti arahan Presiden itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengajak semua pihak untuk meningkatkan kerja sama penyiapan regulasi hak penerbit untuk menghadirkan konvergensi industri media di Indonesia.

Sementara itu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan, arahan Presiden telah ditindaklanjuti dengan mengajukan izin prakarsa melalui Kementerian Sekretariat Negara serta pembahasan bersama pemangku kepentingan mengenai materi rancangan Perpres berjudul Kerja Sama Platform Digital dan Media untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Kominfo Bapak Johnny G. Plate meminta pembahasan Rancangan Perpres langsung dimulai

saja. Hari ini, Rabu 15 Februari 2023 pukul 14.00 Kementerian Kominfo mengundang kementerian/ lembaga terkait serta Dewan Pers untuk membahas kembali Rancangan Perpres mengenai Publisher Rights,” jelasnya dalam Konferensi Pers mengenai Media Sustainability dan Publisher Rights, di Ruang Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (15/02/2023).

Dirjen Usman Kansong menyatakan tim perumus yang dibentuk Kementerian Kominfo telah melakukan pembahasan Rancangan Perpres Kerja Sama Platform Digital dan Media untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas berdasarkan usulan Tim Media Sustainability Dewan Pers.

“Secara garis besar isi rancangan perpres tersebut memuat substansi kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers di Indonesia untuk mendukung jurnalisme berkualitas serta pelaksana Perpres itu,” ujarnya.

Sesuai dengan hasil pembahasan bersama ekosistem pers Indonesia, platform digital yang beroperasi di Indonesia harus bekerja sama dengan media di Indonesia dalam penyaluran dan pemanfaatan berita.

“Jadi berita kita batasi, tidak konten-konten yang lain. Dalam melaksanakan perpres ini ada badannya, ada lembaganya, ada institusinya yang ini juga bentuknya akan kita diskusikan,” tandas Dirjen IKP Kementerian Kominfo.

Pemerintah bersama konstituen pers telah membahas rancangan regulasi publisher rights atau hak penerbit sejak tahun 2020. Dirjen Usman Kansong menjelaskan proses pembahasan dan penyusunan berawal dari arahan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pers Nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 9 Februari 2020. Selanjutnya, Dewan Pers membentuk Tim Media Sustainability yang menghasilkan rancangan regulasi yang diberi judul Tanggung Jawab Platform Digital dan Jurnalisme Berkualitas.

“Pada Oktober 2021, tim media sustainability menyerahkan rancangan regulasi itu kepada Menteri Kominfo. Pada hari itu juga, Menteri



Secara garis besar isi rancangan perpres tersebut memuat substansi kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers di Indonesia untuk mendukung jurnalisme berkualitas serta pelaksana Perpres itu



Kominfo menyerahkan rancangan regulasi kepada Menkopolkam untuk diujicoba apakah kemungkinan masuk sebagai bagian revisi Undang-Undang ITE," ujarnya.

Berdasarkan hasil peninjauan dan masukan dari kementerian dan lembaga terkait, rancangan itu tidak dimungkinkan masuk sebagai bagian dari UU ITE dengan berbagai argumen. Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan, menjelang Hari Pers Nasional 2022, Deputi Hukum Sekretariat Kabinet memberikan masukan agar rancangan regulasi menjadi produk hukum berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Menurut Dirjen Usman Kansong, selanjutnya Menkominfo menggelar rapat dengan Dewan Pers dan para konstituen seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia), dan lain-lain.

"Pemilihan regulasi dalam bentuk Perpres juga berdasarkan masukan dan pendapat dari berbagai pihak. Hal itu kemudian diajukan Kementerian Kominfo ke Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan izin prakarsa," jelasnya.

Atas nama Kementerian Kominfo, Dirjen IKP Kementerian Kominfo mengapresiasi Dewan Pers dan konstituen yang telah memberikan masukan dalam Rancangan Publisher Rights.

"Ini bagus, ada semangat bersama antara komunitas pers dan pemerintah untuk segera menghasilkan rancangan perpres seperti diminta oleh Presiden," ungkapnya.

Menurut Dirjen Usman Kansong penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur Publisher Rights memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan agar menghasilkan pengaturan yang lebih baik.

"Karena memang lahirnya rancangan perpres ini membutuhkan kebersamaan, membutuhkan kolaborasi, persatuan antara teman-teman pers, Dewan Pers, dan konstituen serta pemerintah supaya nanti rancangan perpres yang dihasilkan adalah milik bersama," tandasnya.



Esensi Publisher Rights

"Publisher rights bukan untuk mengatasi dominasi di saat munculnya new comer over the top. Tapi untuk membangun satu konvergensi industri media untuk menjaga agar lapangan usaha lebih berimbang, agar bisa hidup bersama-sama, yang saling memperkuat antara konvensional media dengan new comer over the top," kata Menkominfo Johnny usai pertemuan dengan Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2022).

Menurut Menteri Johnny, Dewan Pers dan konstituen telah bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran untuk menyusun naskah akademik berkaitan dengan regulasi hak penerbit. Menkominfo menyatakan naskah akademik tersebut ditargetkan rampung dalam dua minggu ke depan.



"Dalam rapat bersama Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers, masih ada beberapa hal yang harus perlu disempurnakan. Mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan kita bisa menyelesaikan naskah akademiknya," ujarnya.

Dari naskah akademik tersebut, Menteri Johnny menyatakan akan mengusulkan langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta hak inisiatif mengusulkan payung hukum berkaitan dengan publisher rights yang relevan.

"Termasuk pilihan payung hukumnya yang paling relevan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena yang terkait dengan publisher rights dan digital tersebar di banyak undang-undang," jelasnya.

Menkominfo menjelaskan salah satu alternatif pengaturan hak penerbit dengan mengaitkan pada payung hukum yang sudah ada. Menteri Johnny menyebutkan beberapa regulasi yang

sudah ada antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Jika pilihan dalam bentuk undang-undang, tentu akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah undang-undang baru atau revisi terhadap berbagai undang-undang? Untuk sementara ini, pilihan teknis yang paling mungkin adalah dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, ini yang sedang kita exercise draft perundang-undangannya dalam bentuk dua payung ini," jelasnya.

Mengenai target implementasi payung hukum publisher rights, Menteri Johnny menegaskan hal itu akan bergantung pada pilihan yang diusulkan. "Apakah dalam bentuk undang-undang atau peraturan turunannya. Sehingga nanti kita akan lihat payung hukum mana yang bisa kita selesaikan dengan cepat. Namun itu juga yang diimplementasikan dan mempunyai landasan hukum yang kuat," jelasnya.

Kolaborasi Media

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo menjelaskan, implementasi payung hukum publisher right tidak hanya menjadi kebutuhan di Indonesia. Kebutuhan itu telah menjadi fenomena global baik di Eropa, Australia, Kanada dan beberapa negara lain yang mengadopsi publisher right dalam konteks nasional.

"Jadi regulasi ini bukan regulasi yang menegaskan sikap anti-platform (digital), bukan sikap menutup diri dari transformasi digital. Tetapi untuk menciptakan sistem media yang seimbang dan setara," tandasnya.

Menurut Agus Sudibyo, jika ada kolaborasi antara media publisher dengan platform digital maka sejauh mungkin kolaborasi saling menguntungkan dan saling menghidupi.

"Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kolaborasi ini berkontribusi besar terhadap upaya untuk membangun good journalism,

good content dan ruang publik yang beradab. Selama ini ada problem di situ, di mana soal liability tanggung jawab platform ada beberapa pertanyaan, sekarang dengan regulasi ini coba diatur," jelasnya.

Melalui kolaborasi tersebut, Agus Sudibyo menjelaskan tentang kesetaraan perlakuan kepada industri media dan platform digital. Menurutnya, ketika industri media massa ketika membuat kesalahan dalam pemberitaan maupun konten, maka ada undang-undang yang mengatur seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran.

"Jadi intinya media massa bertanggung jawab atas konten yang mereka sebar. Kami juga ingin platform global juga bertanggung jawab atas konten yang turut mereka sebar, meskipun itu bukan mereka yang membuat konten. Jadi similarity equality antara publisher dan platform ini yang ditekankan dalam undang-undang ini," ujarnya.

Agus Sudibyo menegaskan semangat implementasi publisher right ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang setara dan kondusif.

"Serta tanggung jawab yang setara dan juga kemudian bagaimana kedua belah pihak dalam kolaborasinya sama-sama berkontribusi terhadap good journalism, terhadap ruang publik yang beradab dan beretika tentu dalam konteks Indonesia ruang publik yang sesuai dengan nilai-nilai NKRI, Pancasila, dan lain-lain," ungkapnya.

Berkualitas dan Sehat

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menyatakan pengaturan itu akan dapat menciptakan jurnalisme berkualitas yang sehat secara ekonomi.

"Salah satu intervensi atau peran kita sebagai subjek adalah dengan menciptakan sebuah ekosistem yang melalui fair level playing field melalui publisher rights. Walaupun di dalamnya sebetulnya terkandung juga persaingan usaha atau monopoli," tuturnya dalam Konvensi Nasional HPN 2022: Membangun Kedaulatan Nasional Di Tengah Gelombang Digitalisasi Global, yang berlangsung secara hibrida dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (7/2/2022).

Menurut Dirjen Usman, saat ini Pemerintah sedang mendiskusikan secara serius mengenai aturan yang akan ditetapkan.

"Apakah berbentuk Undang-Undang, Revisi UU, atau Peraturan Pemerintah (PP) atau lainnya. Sebab, jika kita lihat memang rezim dari publisher rights ini luas juga. Apakah bersifat copyright atau lebih ke news bargaining code atau apa persaingan usaha? Masing-masing ada kelebihan sekaligus punya kelemahan," tuturnya.



Oleh karena itu, baik Pemerintah dan industri media perlu mendiskusikan secara lebih baik apakah nanti akan memakai kedua aturan itu (kombinasi) ataukah penekanannya lebih ke salah satunya.

“Sebab apabila berbicara soal copyright, memang tantangannya akan besar karena platform global itu akan mengatakan, ‘Kami yang punya copyright dalam hal teknologi!’ Misalnya, itu bisa menjadi argumen bagi mereka untuk katakanlah mendiskusikan secara lebih jauh atau mempersoalkan undang-undang ini,” jelas Dirjen IKP Kementerian Kominfo.

Dalam webinar yang dihadiri oleh pekerja media nasional secara daring dan luring, Dirjen Usman Kansong mengharapkan dalam waktu dekat pengaturan tersebut bisa segera terwujud. Bahkan saat ini, Dirjen IKP Kementerian Kominfo tengah mendiskusikan prosedur pengaturan tersebut dengan Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM.

“Supaya nanti aturan ini bisa segera kita buat dan kemudian diterapkan. Saya kira harus dirumuskan dengan sangat baik dan sekarang ini sedang dirumuskan naskah kedua dari publisher rights, sekaligus naskah akademiknya,” tandasnya.

Dirjen Usman Kansong menjelaskan, model publisher rights atau news bargaining code kini sudah menjadi fenomena global. Hal itu seperti diterapkan dalam News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code 2021 di Australia, Journalism Competition and Preservation Act di Amerika Serikat, kemudian “Directive on Copyright in the Digital Single Market (CDSM)”

di Uni Eropa yang diadopsi oleh Perancis, Italia dan Denmark.

“Kemarin Staf Ahli Menkominfo juga mendapat pertanyaan dari kawan-kawan di Asia Tenggara seperti apa nasib publisher rights kita? Kelihatannya mereka pun sudah mulai mengintip Indonesia akan seperti apa dan bila Indonesia nanti mengundang ini, mereka saya kira akan juga segera mengikutinya. Ini betul-betul menjadi fenomena global,” tuturnya.

Direktur Jenderal IKP Kominfo menegaskan, pengaturan mengenai publisher rights akan menciptakan sebuah ekosistem yang bersifat mandatory.

“Artinya obligation, jadi kewajiban atau obligatory. Bukan bersifat inisiatif atau kesukarelaan. Inilah letak pentingnya kenapa kita harus melakukan intervensi melalui peraturan undang-undang,” tandasnya.

Bahkan menurut Dirjen Usman Kansong, Pemerintah berharap keberadaan undang-undang itu akan bisa menciptakan jurnalisme berkualitas yang sehat secara ekonomi.

“Ada revenue sharing di situ, nanti diatur data sharing liability sharing yang transparan dan adil. Kemudian juga dari sisi jurnalisme, ada verifikasi pemberitaan, perusahaan media misalnya, kode etik nantinya betul-betul diterapkan. Saya kira ini akan menghasilkan jurnalisme berkualitas dan sehat secara ekonomi bila kita sudah mempunyai atau menciptakan sebuah ekosistem fair level playing field yang memadai melalui publisher rights,” ungkapny.

F1 PowerBoat Danau Toba

Gelaran ajang balap kapal cepat paling bergengsi dunia F1PowerBoat di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, Sumatra Utara, membuktikan bahwa Danau Toba cocok untuk menjadi lokasi berbagai event internasional.



Presiden Joko Widodo menilai bahwa ajang-ajang internasional seperti ajang balap perahu F1H2O/Powerboat akan dapat membangun jenama dari daerah yang menyelenggarakannya serta memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. "Kita harapkan event-event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah. Di sini, di Danau Toba ada F1 Powerboat, nanti di Mandalika ada MotoGP, di Jakarta ada Formula E, nanti di Mandalika ada Superbike, saya kira ini akan mengtrigger ekonomi di daerah. Sangat bagus," ujar Presiden.



Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dan Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary dalam Konferensi Pers di Media Center F1 Powerboat, Lapangan Sisingamangaraja, Kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sabtu (25/02/2023).



Menurut Menkominfo, Kementerian Kominfo bersama operator telekomunikasi telah membangun jaringan fiber optic sepanjang 1.064 Km yang membentang di 22 dari 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Toba. Bahkan event internasional itu juga didukung dengan jaringan 5G. "Disiapkan pula kapasitas unduh berkecepatan 100 Mbps, dengan kapasitas yang tersedia 1 Gbps," jelasnya dalam Konferensi Pers, Sabtu (25/02/2023).



Menteri Kominfo Johnny G. Plate bersama Menko x Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua MPR Puan Maharani, Ketua DPR Bambang Soesatyo terlihat santai menyaksikan kompetisi balap internasional F1 Powerboat Toba.



Keseruan gelaran balap air F1 Powerboat di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, Sumatra Utara. Tercatat ada sebanyak 20 pembalap dari 10 tim mengikuti putaran pembuka dari F1 Powerboat bertajuk Kopiko Grand Prix of Indonesia, di antaranya Abu Dhabi team (UAE), Victory (UAE) China CTIC Team (Prancis), F1 Atlantic Team (Portugal), Sharjah Team (UAE), Swedia Team (Swedia), Stromoy Racing F1H20 (Norwegia), Gilman Racing (Amerika Serikat), Maverick Racing (Prancis), dan Comparato F1 (Italia).



Para pemenang berfoto bersama Presiden RI Joko Widodo, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Dalam seri balap ini, pebalap dari Stromoy Racing, Bartek Marszalek berhasil meraih peringkat pertama usai melibas sirkuit sepanjang 2,2 km sebanyak 18 lap. Dengan hasil itu, Marszalek berhak atas 20 poin yang menjadi modal penting untuk mengarungi tujuh putaran selanjutnya dalam gelaran F1 Powerboat musim 2023.

Pemerintah Kebut Digitalisasi Layanan Publik

Pandemi virus corona sejak empat tahun terakhir telah mengajarkan kita akan banyak hal. Salah satunya, soal pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah aksesibilitas dan komunikasi. Sehingga, setiap orang agar menjadi selalu terhubung.

Terlebih ketika pandemi baru mulai merebak dan angka kasus harian menanjak, ruang gerak setiap orang dibatasi untuk memutus penyebaran virus. Situasi tersebut nyaris membuat setiap aktivitas dan roda kehidupan masyarakat mengandalkan kemampuan teknologi digital. Mulai dari bekerja, menggelar rapat dan pertemuan, memesan makanan, membeli aneka kebutuhan pokok, dan transaksi keuangan dilakukan secara daring dari gawai.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dalam surveinya menemukan bahwa terjadi lonjakan pengguna internet pada periode 2021-2022, yakni mencapai 220 juta orang. Padahal pada 2019, jumlah itu tak lebih dari 175 juta orang.

Menghadapi hal itu, pemerintah pun dituntut untuk ikut tanggap dalam menghadirkan pelayanan publik yang makin terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Di era masyarakat yang makin melek digital, memang muncul tuntutan lebih besar lagi terhadap kecepatan pelayanan publik dan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi digital untuk menyesuaikan perkembangan zaman.

Penelitian McKinsey & Company tentang Digital Public Service yang dilansir medio Juli 2020 mengungkap kondisi tersebut. Dikatakan,

digitalisasi dalam pelayanan publik bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bagi internal penyelenggara pelayanan publik.

Digitalisasi dapat menghemat hingga 50 persen waktu pelayanan dan 50 persen anggaran yang dikeluarkan di kemudian hari. Selain itu, digitalisasi layanan membuat efisiensi dalam bekerja hingga 60 persen. Oleh karena itu, selama pandemi pemerintah memperbanyak pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi digital.

Hasilnya, berdasarkan survei Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA), Indonesia ditempatkan di peringkat 77 di antara 193 negara anggota PBB terkait implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal itu merujuk E-Government Survey 2022 bertajuk The Future of Digital Government yang diumumkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Koordinasi Kebijakan dan Hubungan Antar Lembaga, Maria-Francesca Spatolisano di New York, pada 28 September 2022.

Indonesia naik 11 peringkat dibandingkan survei edisi sebelumnya pada 2020. Dalam E-Government Survey 2020, UNDESA menempatkan Indonesia di urutan 88 dunia. Hal ini menunjukkan upaya pengembangan dan pelaksanaan SPBE telah berjalan dengan baik. Hasil survei tersebut menjadi penanda kuat bahwa digitalisasi harus segera diwujudkan. Utamanya dalam pemerintahan agar layanan publik dari aparat sipil negara (ASN) makin meningkat.

Perkuat Layanan

Oleh karena itu, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dan meningkatkan implementasi dari Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Salah satunya, seperti yang dilakukan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam pengembangan aplikasi portal pelayanan publik nasional dan mal pelayanan publik digital.

Bentuknya adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Kominfo berperan untuk memberi dukungan teknologi informasi dalam bentuk penyusunan domain arsitektur yang terkait dengan domain aplikasi dan infrastruktur SPBE.

Itu sesuai dengan peran kementerian yang dipimpin Johnny G. Plate itu dalam Perpres 95/2018 dan pengalaman Kominfo dalam pengembangan berbagai aplikasi untuk peningkatan layanan dan informasi pemerintah. Begitulah yang terungkap dari pertemuan antara Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dan pihak Kominfo yang diwakili Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Pada kesempatan itu Diah menjelaskan, kendati SP4N-LAPOR! sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum, masih ada masalah dalam hal integrasi aplikasi sejenis. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan aplikasi umum bidang pelayanan publik untuk diintegrasikan dalam portal pelayanan publik.

Selanjutnya, untuk pengembangan mal pelayanan publik digital dibutuhkan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi. Prosesnya terdiri atas perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak.

“Manajemen layanan yang dilakukan meliputi serangkaian proses pelayanan pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan aplikasi. Keberlangsungan aplikasinya harus terjamin untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap pengguna,” tutur Diah seperti dikutip dari website Kementerian PANRB.

Mal pelayanan publik digital atau dikenal sebagai MPP Digital disiapkan pihak Diah sebagai portal pemerintah daerah yang terintegrasi dengan berbagai layanan elektronik (e-services) di pemerintahan kabupaten/kota. Kementerian PANRB turut menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan proses bisnis pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam portal pelayanan publik.

Diah beralasan, Kementerian PANRB bersinergi dengan Kominfo terkait pengalaman kementerian yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 9 itu dalam pengembangan aplikasi layanan berbagi pakai data dan informasi pemerintah kepada publik. Terkait MPP Digital, Diah mengutarakan sedang disiapkan kerja sama strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perbankan.

“Kami tentunya membutuhkan dukungan Kementerian Kominfo untuk mengawal dan berpartisipasi dalam proses kolaborasi ini karena tentu ada kaitannya dengan legalitas dan ketentuan teknis pengelolaan aplikasi MPP Digital. Karena BUMN sektor perbankan punya keterbatasan untuk mendukung aplikasi terutama dalam penyediaan layanan di luar perbankan,” ucap Diah.

Dirjen Aptika Samuel sendiri dalam berbagai kesempatan menyebutkan, Kominfo memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan digitalisasi karena dukungan infrastruktur yang memadai. Itu ditandai oleh telah terbangunnya jaringan serat optik sepanjang lebih dari 450 ribu kilometer sebagai dukungan tulang punggung (backbone) internet berkecepatan tinggi. Ditambah kehadiran 610 ribu Base Transceiver Station (BTS) dan 15.000 titik akses untuk konektivitas jaringan internet di seluruh Indonesia.

SmartASN

Sementara itu, Kementerian PANRB bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian BUMN, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) akan menjadi proyek percontohan untuk penerapan aplikasi SmartASN. Aplikasi ini diusulkan bersifat umum bidang pengelolaan kepegawaian ASN sekaligus percepatan transformasi digital secara nasional.

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengungkapkan hal itu dalam acara pengenalan aplikasi ini di Jakarta, Selasa (10/1/2023). Aplikasi anyar tersebut sudah dapat diintip di <https://smartasn.go.id>. "Semoga aplikasi SmartASN ini bisa mendukung mekanisme kerja ASN yang agile (lincah) dan kolaboratif di instansi pemerintah," kata Rini.

SmartASN adalah platform digital pengelolaan dan wadah kolaborasi ASN untuk memperoleh layanan kepegawaian (employee services) dan mempermudah praktik-praktik pengembangan sumber daya manusia (human capital practices)

dalam ekosistem digital. Terdapat 10 modul dalam aplikasi SmartASN, antara lain Pegawai, Keuangan, Pembelajaran, Medsos, Grup, Talenta, Kinerja, Vendor, Waktu dan Instansi.

Pada 2022 terdapat tujuh modul yang diimplementasikan yaitu Pegawai, Pembelajaran, Medsos, Grup, Talenta, Kinerja, dan Instansi. "Proses piloting dilakukan secara bertahap pada tiga modul utama, yaitu Kinerja, Talenta, dan Pembelajaran (e-learning)," ungkap Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo.

Sosialisasi aplikasi ini, di keempat kementerian dan lembaga, sudah dilakukan sejak November 2022 dan akan dilanjutkan hingga Maret dan April 2023. Aplikasi SmartASN juga akan tersedia dalam versi mobile apps Android. Targetnya, pada 2023 ini diharapkan aplikasi SmartASN bisa diimplementasikan pada 78 kementerian dan lembaga dan 2024 sudah dapat diimplementasikan pada seluruh pemerintah daerah.



Refarming Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Selesai, Kominfo Target Peningkatan Layanan

Penataan ulang atau refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz secara nasional telah selesai. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan peningkatan kualitas layanan pita lebar atau broadband untuk masyarakat.

Direktur Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Denny Setiawan menyatakan secara keseluruhan, terdapat total 16 cluster yang didefinisikan untuk keperluan refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz.

"Refarming selama 67 hari kalender yang dimulai

pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 berawal dari cluster paling timur Indonesia yang mencakup wilayah provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dan telah tuntas pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 di cluster paling barat Indonesia yang mencakup wilayah provinsi Aceh dan Sumatera Utara," jelasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (10/02/2023).

Menurut Direktur Denny Setiawan, pelaksanaan refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz ini melibatkan tiga penyelenggara jaringan bergerak seluler yaitu PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi

Selular, dan PT XL Axiata Tbk. Ketiga operator itu, menjadi pemegang Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) pada pita frekuensi radio 2,1 GHz.

“Adapun jumlah site yang telah dilakukan refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz adalah sebanyak 116.662 site, dengan rincian masing-masing operator yaitu PT Indosat Tbk 35.647 site, PT Telekomunikasi Selular 54.093 site, dan PT XL Axiata Tbk 26.922 site,” tuturnya.

Keputusan melakukan refarming diambil karena adanya penetapan yang tidak contiguous pada pita frekuensi radio 2,1 GHz,

“Refarming dilakukan karena memperhatikan hasil seleksi pengguna pita frekuensi radio pada rentang 1975 – 1980 MHz berpasangan dengan 2165 – 2170 MHz yang ditetapkan kepada PT Telekomunikasi Selular, sehingga terdapat penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz yang tidak berdampingan (non-contiguous),” jelas Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo.

Hasil akhir kegiatan refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz tampak sebagai gambar berikut, di mana kondisi penetapan IPFR 2,1 GHz sudah berdampingan (contiguous). Direktur Denny Setiawan menjelaskan proses kegiatan refarming dilakukan tengah malam untuk meminimalkan potensi gangguan layanan pada masyarakat. “Dimulai sekitar pukul 23.00 waktu setempat sampai pukul 02.00 keesokan harinya,” ujarnya.

Menurut Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, refarming berjalan dengan lancar karena adanya koordinasi yang baik antara tim Kementerian Kominfo dan operator selular (PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Selular, dan PT XL Axiata Tbk).

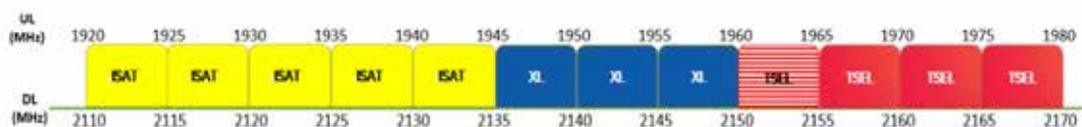
“Sehingga proses refarming di suatu cluster dapat diselesaikan tanpa adanya fallback satu cluster pun hingga cluster yang terakhir,” tandasnya.

Selama proses refarming berlangsung, Kementerian Kominfo melalui UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio juga telah melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan terhadap refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz.

“Salah satunya dengan melakukan kegiatan Frequency Clearance. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pemindahan frekuensi berjalan sesuai dengan skenario yang ditetapkan dan menghindari terjadinya interferensi. Kegiatan Frequency Clearance tersebut dilakukan mulai tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023,” tutur Direktur Denny Setiawan.

Kualitas Layanan

Kementerian Kominfo mengharapkan penetapan pita yang berdampingan (contiguous) pada pita frekuensi radio 2,1 GHz akan memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan selular.



Keterangan:



PT Indosat Tbk



PT XL Axiata Tbk



PT Telekomunikasi Selular



PT Telekomunikasi Selular hasil penataan ulang pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz yang merupakan hasil seleksi tahun 2022

“Manfaat refarming tersebut terkait dengan perbaikan kualitas layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan, baik itu layanan 4G maupun 5G terlebih pita frekuensi radio 2,1 GHz merupakan salah satu capacity band dengan bandwidth yang lebar,” ungkap Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo.

Peningkatan kualitas layanan tersebut, menurut Direktur Denny Setiawan dimungkinkan karena terciptanya optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kecepatan akses internet mobile broadband yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Karena spektrum frekuensi radio dapat dimanfaatkan secara optimal, maka kapasitas jaringan seluler pun akan turut meningkat sehingga mampu mengimbangi pertumbuhan traffic data

yang terus bertumbuh pesat, bahkan di sejumlah titik saat ini terjadi kepadatan jaringan (network congestion),” jelasnya.

Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo mengharapkan kondisi pita frekuensi radio 2,1 GHz yang contiguous pasca refarming akan memberikan peningkatan kemudahan dan efisiensi dalam proses implementasi jaringan maupun upgrade teknologi mobile broadband oleh operator.

“Diharapkan khususnya kepada PT Indosat Tbk dan PT Telekomunikasi Selular, setelah penetapan pita frekuensi radio 2,1 yang berdampingan, layanan seluler terutama internet cepat kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik lagi.” ungkapnya.

Kominfo Tangani 683 Situs Pemerintahan dan Lembaga Pendidikan yang Disusupi Konten Perjudian



Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penanganan terhadap 683 situs pemerintahan dan lembaga pendidikan yang disusupi konten bermuatan perjudian. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan merinci ada 461 situs dengan domain go.id dan 222 situs domain ac.id itu merupakan hasil temuan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023.

“Per hari ini, penanganan konten internet negatif pada domain .go.id dan ac.id ini berdasarkan hasil crawling dan aduan masyarakat. Kami telah menghubungi kontak pengelola domain yang tersusupi konten perjudian dan melakukan penonaktifan sementara nama domain yang disalahgunakan,” jelasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (13/02/2023).

Menurut Dirjen Samuel, Kementerian Kominfo memiliki wewenang melakukan penonaktifan sementara nama domain yang berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan.

“Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Penanganan itu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur adanya tanggung jawab penyelenggara terhadap sistem elektronik yang dikelola masing-masing.

“Kami mengingatkan kepada berbagai kementerian dan lembaga nasional maupun daerah untuk bertanggung jawab terhadap pengoperasian situs yang dikelola,” tandas Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Saat ini, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) untuk penanganan situs yang mengalami masalah penyalahgunaan.

“Dan terus melakukan sosialisasi bersama BSSN dari segi keamanannya dan PANDI selaku registri domain .id,” tutur Dirjen Samuel.

Menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, penyebab kerentanan situs pemerintah domain .go.id disisipi konten perjudian, selain karena faktor kurangnya pemahaman keamanan siber, juga banyak domain yang sudah tidak aktif digunakan oleh instansi pemerintah yang disisipkan konten perjudian. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengimbau agar pengelola domain .go.id untuk melakukan migrasi situs web ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dapat diakses melalui pdn.layanan.go.id.

“Saya juga merekomendasikan agar pengelolaan situs pemerintahan dimigrasikan ke PDNS. Kami terus mendorong seluruh stakeholder pengelolaan situs pemerintah untuk bersinergi, baik dari segi keamanan, efisiensi, maupun tata kelolanya,” ungkapnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, masalah penyalahgunaan situs pemerintahan dan lembaga pendidikan untuk konten perjudian telah ditemukan sejak bulan April 2022. Temuan terbanyak pada bulan Januari 2023 yakni sebanyak 268 situs pemerintahan dan 152 situs lembaga pendidikan yang mengalami masalah penyalahgunaan.



Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (13/02/2023). - (Pey)

Pemerintah Usulkan Tujuh Materi Rancangan Perubahan Kedua UU ITE

Pemerintah mengajukan tujuh materi usulan perubahan materi dalam Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan usulan itu ditujukan agar dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan yang ada serta merespons dinamika masyarakat.

"UU ITE kemudian diusulkan untuk direvisi kembali untuk pengaturan yang lebih baik, karena itu Pemerintah mengusulkan Rancangan Perubahan Kedua UU ITE bersama naskah akademis yang telah Bapak Presiden sampaikan kepada Ketua DPR RI pada 16 Desember 2021 lalu," ungkapnya dalam Rapat Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta Selatan, Senin (13/02/2023).

Menkominfo menyatakan, dalam Rancangan Perubahan Kedua UU ITE, Pemerintah telah memperhatikan upaya peningkatan penataan dan pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Setidaknya ada tujuh materi perubahan yang diusulkan, antara lain:

1. Perubahan terhadap ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dari Pasal 27 mengenai kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk pada ketentuan KUHP;

2. Perubahan ketentuan Pasal 28 sehingga hanya mengatur ketentuan mengenai berita bohong atau informasi yang menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiil konsumen;

3. Penambahan ketentuan Pasal 28A diantara Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai konten suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat;

4. Perubahan ketentuan penjelasan Pasal 29 mengenai perundungan (cyber bullying);

5. Perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain;

6. Perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan denda serta menambah pengaturan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas penyalahgunaan pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); dan

7. Perubahan ketentuan pasal 45A terkait pidana atas pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat.

Selain tujuh materi perubahan tersebut, Menteri Johnny juga menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo mengadakan diskusi publik pada tahun 2022 mengenai UU ITE, dan salah satu poin penting dalam usulan yang muncul selama diskusi publik tersebut adalah adanya masukan agar dalam revisi kedua UU ITE menyertakan norma Restorative Justice.

“Usulan ini direncanakan dimuat dalam UU ITE sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan dalam Pasal 45 ayat (5) UU ITE terkait bentuk aplikasi Restorative Justice,” tandasnya.

Sebelumnya, pada tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan pedoman implementasi atas pasal-pasal tertentu UU ITE agar aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan maupun penuntutan memiliki pemahaman yang sama dan menerapkan ketentuan pidana konten ilegal secara konsisten.

“Ini strategi jangka pendek, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyusun pedoman bersama mengenai implementasi UU ITE,” tutur Menteri Johnny.

Adapun mengenai strategi jangka panjang, menurut Menkominfo dengan Pemerintah mengajukan Rancangan Perubahan Kedua UU ITE yang disampaikan pada tahun 2021.

“UU ITE dibentuk untuk menciptakan ketertiban (order) di ruang siber dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi,” tegasnya.

Dalam rapat kerja itu, hadir mendampingi Menkominfo Johnny G. Plate antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel A. Pangerapan; serta Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong serta Plt, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Hary Budiarto.



Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (13/02/2023). - (Pey)

Menkominfo: Perubahan Kedua UU ITE Perlu Harmonisasi dengan UU KUHP

Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan perubahan kedua itu perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

"Mengingat usulan rancangan perubahan kedua UU ITE disampaikan sebelum UU KUHP disahkan, perlu dilakukan harmonisasi antara rancangan perubahan kedua UU ITE dengan UU KUHP untuk melakukan penyesuaian terhadap 10 materi tersebut," jelasnya dalam Rapat Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta Selatan, Senin (13/02/2023).

Menteri Johnny menyatakan secara umum UU ITE memuat dua materi pokok yaitu penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengaturan tentang cybercrime.

“UU ITE merujuk kepada Budapest Convention on Cybercrime serta memperbaharui ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang siber pada ketentuan hukum pidana,” ungkapnya.

Menkominfo menyatakan sesuai pasal 622 ayat 1 huruf r UU KUHP terdapat ketentuan dalam UU ITE yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, antara lain:

1. Ketentuan pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan dan ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.
2. Ketentuan pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA.
3. Ketentuan pasal 30 mengenai akses ilegal.
4. Ketentuan pasal 31 mengenai intersepsi atau penyadapan.
5. Ketentuan pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain
6. Ketentuan pasal 45 ayat 1 ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 1 terkait kesusilaan dan ayat 3 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.
7. Ketentuan pasal 45 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian berdasarkan SARA.
8. Ketentuan pasal 46 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 30 terkait akses ilegal.
9. Ketentuan pasal 47 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan, dan
10. Ketentuan pasal 51 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Menteri Johnny mengharapkan harmonisasi itu akan menjadi perhatian bersama Pemerintah dan DPR RI. “Sesuai surat Presiden kepada Ketua DPR RI No. R-58/Pres/12/2021, pada 16 Desember 2021, Pemerintah telah menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) perubahan kedua UU ITE. Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI,” ungkapnya.

Dalam rapat kerja itu, hadir mendampingi Menkominfo Johnny G. Plate antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel A. Pangerapan; serta Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong serta Plt, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Hary Budiarto.





Siapkan SDM Transformasi Digital, Kominfo Buka Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri Tahun 2023

Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali membuka Program Beasiswa S2 bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam maupun luar negeri.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo Haryati menyatakan Program Beasiswa Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak orang dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Agar ketersediaan SDM unggul di bidang TIK dapat merata sehingga membantu percepatan transformasi digital nasional baik di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta,” ungkapnya dalam Sosialisasi Pembukaan Program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri Kementerian Kominfo di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (23/02/2023).

Program beasiswa yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 ini merupakan program beasiswa yang fokus pada pemberian pendidikan pascasarjana di bidang komunikasi dan informatika.

“Program ini telah membiayai lebih dari 2.500 masyarakat Indonesia untuk menempuh pendidikan pascasarjana,” tutur Sekretaris Balitbang SDM Kementerian Kominfo.

Menurut Sekretaris Haryati, target pelamar Program Beasiswa Tahun 2023 ini dibuka bagi PNS, anggota TNI/POLRI, dan masyarakat umum non-PNS dari Kementerian/LPNK/BUMN/Swasta/Pelaku startup yang bekerja di bidang TIK.

“Kominfo berkomitmen untuk membantu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia serta menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia unggul di bidang TIK bagi industri dan instansi pemerintahan,” tandasnya.

Direktur Politik dan Komunikasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Astri Kusuma Mayasari, menjelaskan isu peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika masuk dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

“Hal tersebut ditujukan untuk mendorong percepatan transformasi digital yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan Program Beasiswa S2 Dalam Negeri, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Sebelas Maret dan Universitas Hasanuddin.

Komponen beasiswa yang diberikan mencakup dana pendidikan, bantuan biaya operasional yang dapat digunakan sebagai dukungan biaya hidup, biaya tesis, dan biaya publikasi jurnal ilmiah dan/ atau keikutsertaan pada konferensi internasional.

Sementara untuk Program Beasiswa S2 Luar Negeri, Kementerian Kominfo bermitra dengan perguruan tinggi di 5 negara, antara lain: University of Twente-Belanda, Tsinghua University-RRT, International Institute of Information Technology (IIITB-India), Eotvos-Lorand University- Hungary, dan The University of Electro Communication (UEC)-Jepang.

Adapun komponen beasiswa Program Beasiswa S2 Luar Negeri yang diberikan mencakup biaya kuliah, biaya hidup, biaya penempatan awal, biaya perjalanan ke dan dari negara tujuan studi, asuransi kesehatan, dana bantuan tesis dan tunjangan keluarga.

Selain acara sosialisasi yang diikuti PNS dari pemerintah daerah, UPT dari Kementerian dan masyarakat umum yang berminat untuk mendaftarkan diri. Balitbang SDM Kementerian Kominfo juga melaksanakan Sosialisasi Program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri untuk Indonesia bagian timur melalui talkshow di TVRI, Radio Memora FM dan Delta FM Manado. Kementerian Kominfo juga akan melaksanakan sosialisasi Program Beasiswa di Kota Palembang untuk wilayah Indonesia bagian barat.

Pendaftaran Program Beasiswa Tahun 2023 resmi dibuka pada 22 Februari 2023 dan ditutup pada 25 Maret 2023. Informasi mengenai persyaratan dan pelaksanaan pendaftaran dapat dilihat melalui laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau melalui tautan beasiswa.kominfo.go.id. Informasi lengkap juga bisa diakses di sini.





Kominfo Bekali Pelajar SMK Provinsi Bali agar Makin Cakap Digital

Denpasar, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo membekali pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Bali dengan literasi digital agar makin cakap digital dalam proses pembelajaran. Literasi digital penting sebagai panduan dalam memanfaatkan dunia digital. "Literasi digital menjadi sangat penting karena berperan sebagai panduan untuk memasuki dunia digital. Dengan bermodalkan kecakapan digital, para pelajar dapat

mengoptimalkan penggunaan teknologi dan menghindari dampak negatifnya," ujar Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi, pada pembukaan kegiatan Literasi Digital di Lingkungan SMK, di Gedung Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Denpasar, Senin (27/02/23).



Lolos Kurasi, 32 Startup Ikuti Program Inkubasi HATCH! Batch 2

Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menggelar Hatch! Batch 2 sebagai bagian dari rangkaian Program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Sebanyak 32 startup digital lolos proses kurasi program yang ditujukan untuk menyiapkan pelaku startup digital yang mumpuni dalam penyiapan produk serta proses bisnis ini.

Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Boni Pudjianto mengapresiasi pelaku startup digital yang terpilih. "Startup yang mengikuti proses kurasi Program Hatch! Batch 2 ini cukup menarik dan beragam serta memiliki peluang bisnis yang menjanjikan," ungkapnya usai proses kurasi di Hotel Ibis Style Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (05/02/2023).

Fitur Baru Aplikasi New ROL Mudahkan Monitoring Frekuensi

Tangerang Selatan (SDPPI) – Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menambahkan fitur-fitur baru pada Aplikasi New Report Online (New ROL) untuk mempermudah monitoring.

“Aplikasi mengalami perubahan yang cukup banyak dari kegiatan pelaporan observasi yang biasanya dilakukan secara manual, kedepannya tidak akan ada lagi data yang ketik manual dalam format excel, melainkan diinput dari data keluaran perangkat monitoring.” ujar Ketua Tim Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi pada Event Khusus dan Antar Negara Renny Kusumaningtyas, Jumat (03/02/23).

Perlu diketahui Aplikasi New ROL merupakan sarana pelaporan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaporkan hasil kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pelaporan berupa data keluaran perangkat monitoring tersebut kemudian diolah secara otomatis oleh aplikasi ROL menjadi informasi antara lain jumlah kabupaten/kota termonitor, jumlah frekuensi yang termonitor, profil layanan seluler di Indonesia, serta profil penggunaan kanal radio FM serta TV digital di Indonesia.



BPSDMP Kominfo Manado Latih 100 Pelaku UMKM di Kota Kotamobagu

Manado, 21 Februari 2023 - Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Manado menggelar kegiatan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Tahun 2023 untuk masyarakat di wilayah Kota Kotamobagu, Manado, dan sekitarnya.

Dalam sambutannya mewakili Kepala BPSDMP Manado, Marthen L. Rondonuwu, S.Sos menyampaikan bahwa program yang sudah dimulai sejak tahun 2018 ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM masyarakat Indonesia di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Diharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan secara serius agar hasil akhir kegiatan ini dapat tercapai dengan baik,” jelasnya.

Kegiatan yang diikuti oleh 100 orang peserta pelaku UMKM se-Kota Kotamobagu ini berlangsung selama dua hari dengan skema pelatihan Dasar Pemasaran Digital. DEA 2023 menghadirkan instruktur Arteurt Yoseph Merung dan Tryadi Wilhelmus Tumewu dari Universitas De La Salle Manado, Irvan Trang Universitas Sam Ratulangi, dan Roby Stevi Lumbu dari Politeknik Negeri Manado.



Sosialisasi Tingkatkan Pemahaman Regulasi Alat/Perangkat Telekomunikasi

Badung (SDPPI) – Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi, Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI mengadakan Sosialisasi Regulasi Terkait Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan SOP Pemeriksaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Direktur Pengendalian SDPPI Sabirin Mochtar dalam sambutannya menekankan perlunya dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap interpretasi khususnya regulasi dan juga memberikan pengetahuan alur SOP kepada seluruh rekan-rekan di Unit Pelaksana Teknis. Lanjut Sabirin Mochtar, apabila ada penerimaan info gangguan dan cara



penanganannya harus sama antar UPT satu dan UPT lainnya. “Perlu kita pastikan bahwa penanganan alat dan perangkat telekomunikasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan harus sama, agar tidak ada interpretasi yang berbeda terhadap regulasi ataupun alur proses penindakan dilapangan” tegas Sobirin, Kamis (23/02/2023)

SDPPI Sukses Amankan Frekuensi F1 Powerboat Toba

Toba (SDPPI) – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ambil andil atas kesuksesan Event Internasional F1 H2O Powerboat lewat dukungan dukungan pengawasan dan pengamanan penggunaan spektrum frekuensi radio selama event berlangsung.

“Kegiatan monitoring telah dilakukan oleh tim Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan dengan melakukan clearance frekuensi

(pengecekan frekuensi sebelum digunakan) beberapa pekan sebelumnya, agar frekuensi yang akan ditetapkan selama kegiatan F1H20 berlangsung tidak mengalami gangguan” ujar Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Medan Latuse, Sabtu (25/02/2023).

Penyelenggara memanfaatkan frekuensi untuk kebutuhan komunikasi radio racing team dan komunikasi penyelenggara, wireless camera serta drone untuk kebutuhan broadcasting. Tim juga mengamankan frekuensi yang digunakan untuk pengamanan Presiden RI dan komunikasi tim keamanan TNI dan Polri, Basarnas, tim kesehatan, BMKG serta komunikasi selular selama event berlangsung.



Jelang Tahun Politik, Kominfo Ajak Masyarakat Ikut Tangkal Hoaks

Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo mengajak masyarakat untuk ikut mengendalikan penyebaran hoaks sebagai antisipasi tahun politik tahun 2024. Masyarakat diminta berpartisipasi aktif mengirimkan aduan melalui aduankonten.id.

“Kami punya layanan aduan. Jika masyarakat menemui konten berbau hoaks silahkan

laporkan ke aduankonten.id,” ujar Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan saat Peluncuran Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (DAMAI), Kamis (16/02/2023).

Dirjen Samuel menjelaskan, terhitung sejak Agustus 2018 hingga 14 Februari 2023 Kemkominfo telah memblokir

11.140 hoaks yang ada di ruang digital. Hoaks tentang isu politik mencapai 8,37% dari total keseluruhan. “Berkaca pada tahun 2019, hoaks terkait politik naik sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2018. Hal ini kita upayakan untuk tidak terulang kembali,” tegasnya.



Balmon Denpasar Sosialisasikan ISR di Gianyar

Gianyar (SDPP) - Penggunaan Spektrum frekuensi radio di kabupaten Gianyar, Bali cukup tinggi sehingga mengalami kepadatan, terlebih Tahun 2023 merupakan, tahun pemulihan sektor ekonomi, khususnya industri pariwisata yang mulai bangkit pasca penerapan PPKM semasa pandemi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Denpasar, Zainullah. "Penggunaan spektrum frekuensi di Kabupaten Gianyar cukup tinggi sehingga perlu mendapatkan perlakuan secara khusus," ungkap Zainullah saat ditemui di sela acara Sosialisasi Regulasi Perizinan Stasiun Radio dan Workshop Teknis Penggunaan Perangkat Komunikasi Radio. Selasa (21/02/ 2022).

Sosialisasi dan workshop tersebut menaras pemilik Izin Stasiun Radio dan sekitarnya, baik hotel, restoran, sektor swasta, instansi pemerintahan, maupun perangkat desa serta media penyiaran televisi dan radio di wilayah Kabupaten Gianyar dan sekitarnya.



DTS ProA Jaring 8.000 Talenta Digital Lewat Content Creation 2023

Jakarta (11/02/2023) - Digital Talent Scholarship (DTS) merupakan salah satu agenda besar Badan Litbang SDM Kominfo untuk mempersiapkan 9 juta Talenta Digital yang dibutuhkan selama 15 tahun untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Untuk mempersiapkan Talenta Digital di Indonesia yang kompeten guna mendukung

Transformasi Digital serta menghadapi tantangan industri 4.0, dan juga menjadi pondasi menuju Indonesia Emas tahun 2045 bagi para angkatan kerja muda di Indonesia. Professional Academy (DTS ProA) adalah salah satu akademi unggulan di DTS Kominfo yang bertujuan untuk meningkatkan skill di bidang TIK bagi tenaga kerja terampil di Indonesia yang relevan dengan kebutuhan industri. Pelatihan DTS ProA ini dikhususkan bagi Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja, atau pernah bekerja yang tidak sedang menempuh pendidikan formal jenjang S1.



Kominfo Tekankan Pentingnya Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024

Samarinda, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aptika menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilu 2024. ASN dilarang mengampanyekan kontestan Pemilu di media sosial.

"Kita (ASN) harus netral, tidak boleh mengampanyekan ataupun mempromosikan para peserta umum di media sosial," ujar Direktur Pemberdayaan Informatika, Boni Pudjianto saat membuka kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk ASN Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Mercure, Samarinda pada Selasa (21/2/23).

Boni mengatakan, netralitas ASN merupakan hal yang harus diperhatikan karena sudah ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Nantinya ASN yang melanggar akan dikenai konsekuensi yang sesuai. "Netralitas ini juga bagian dari upaya transformasi digital ASN. Sehingga dibutuhkan adaptasi dalam penggunaan media digital di lingkungan pemerintahan," tambahnya.



Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment

Gelamat Memperingati
ISRA MIKRAJ
Nabi Muhammad SAW

1444 H/2023

18 FEBRUARI

